

**LEGITIMASI POLITIK MASYARAKAT KOTA PALEMBANG
TERHADAP KEMENANGAN PRESIDEN JOKO WIDODO
PADA PILPRES 2019**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Politik**

OLEH :

Boby Sumarlin

NIM : 1657020022

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
1441 H / 2019 M**

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik, UIN Raden Fatah

di

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Bobby Sumarlin, NIM. 1657020022 yang berjudul **Legitimasi Politik Masyarakat Kota Palembang Terhadap Kemenangan Presiden Joko Widodo Pada Pilpres 2019** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian, terima kasih.

Wassalammualaikum

Palembang, 6 November 2019

Pembimbing I



Dr. andi candra jaya, M.Hum
NIP. 197201192007012011

Pembimbing II



Hatta Azzuhri, M.Si
NIDN. 2016028804

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Bobby Sumarlin
NIM : 1657020022
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Legitimasi Politik Masyarakat Kota Palembang Terhadap
Kemenangan Presiden Joko Widodo Pada Pilpres 2019.

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Raden Fatah Palembang pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 06 November 2019
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UIN Raden Fatah.

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata I (SI) pada Jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 15 November 2019



DEKAN,

Prof. Dr. Izomiddin, M.A
NIP. 196206201988031001

TIM PENGUJI

KETUA,

Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum
NIP. 197201192007012011

SEKERTARIS

Erik Darmawan, M.HI
NIDN. 0217057402

PENGUJI I,

Dr. Kun Budianto, M.Si
NIP. 197906192007101005

PENGUJI II,

Mariatul Qhtiyah, MA, Si
NIDN. 2011049001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bobby Sumarlin

NIM : 1657020022

Jurusan : Ilmu Politik

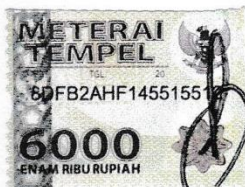
Judul Skripsi : Legitimasi Politik Masyarakat Kota Palembang Terhadap
Kemenangan Presiden Joko Widodo Pada Pilpres 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 06 November 2019



Bobby Sumarlin
NIM. 1657020022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Semakin Berisi Semakin Merunduk (Ilmu Padi)”

PERSEMBAHAN

Karya tulisku ini kupersembahkan kepada:

1. Ibunda Tercinta Rogaya Marlina yang selalu mendukung dan mendo'akanku agar menjadi orang yang sukses, dan rela setiap hari bangun larut malam untuk dagangan pagi untuk uang jajan kuliah ku.
2. Ayahanda Tercinta M. Ali Hanafiah yang telah rela banting tulang kerja keras sebagai buruh bangunan ditengah terik matahari untuk menafkahi keluarga dan untuk membiaya kuliah ku.
3. Adik Tercinta M. Jerry Ramadhan agar lebih semangat lagi belajar agar cita – cita kedua orang tua kita terwujud (menjadi orang sukses).
4. Pembimbingku Bapak Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum. dan Bapak Hatta Azzuhri, S.IP, M.Si yang telah memberikan support dan bimbingan untukku sehingga ku bisa menyelesaikan skripsi ku.
5. Mentorku Bapak Erik Darmawan, S.IP., M.HI karena bimbingan bapaklah saya bisa menyelesaikan skripsi ini, dari awal pembuatan proposal skripsi sampai tahap akhir bapak tidak henti-hentinya memberikan kami semangat dan support.

6. Mentorku Ayuk Istiana yang sudah mengarahkanku membuat proposal skripsi dan selalu siap memeriksa kata dan huruf-huruf kalimat yang salah dalam tulisan skripsiku.
7. Penyemangatku Ida Hayati yang selalu support, selalu ngedo'ain dan selalu menyempatkan waktu menemaniku bimbingan.
8. Sahabat-sahabatku kelas Ilmu Politik 1 (1602A) Ade Samudra, Alex Rodhinal, Dendi Wiharja, Ahmad Fauzan, Agung Setiawan dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Sahabat-sahabat Misip FC Adit, Ojan, Topek, Bimo, Deni, Wawan, Abi, May, Arif, Kepen, dinok, Charles, Taay, Uus, dll, semoga cepat nyusul.
10. Teman-teman pejuang skripsi dan teman-teman Ilmu Politik angkatan 2016.
11. Semua sahabat-sahabati PMII Rayon Fisip.
12. Dan semua pihak yang telah memberi arahan untukku dalam mengerjakan skripsi.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap Kemenangan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, di mana metode kualitatif ini yang menjadi alat untuk menganalisis legitimasi atau pengakuan masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan Presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari 27 informan masyarakat Kota Palembang yang diambil dari 18 kecamatan Kota Palembang, 10 informan menyatakan menerima kemenangan Presiden Joko Widodo dengan berpendapat bahwa pada kepemimpinan Presiden Jokowi Widodo, mereka mengaku cukup puas dengan pembangunan infrastruktur yang sangat maju. Pada sisi lain bantuan ekonomi dari Pemerintah sangat membantu kebutuhan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, jadi masyarakat mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan sebagian juga menyatakan bahwa mau tidak mau harus menerima karena hukum sudah mengesahkan kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Sedangkan 17 informan tidak menerima kemenangan Presiden Joko Widodo karena 17 informan berpendapat bahwa dalam kepemimpinan presiden Joko Widodo mereka sebagai masyarakat semakin kesulitan dibidang ekonomi dan mereka berpendapat bahwa kepemimpinan presiden Jokowi banyak yang tidak sesuai aturan, sebagian berpendapat bahwa dalam kemenangan Jokowi diduga adanya kecurangan dan mereka beranggapan bahwa dalam kepemimpinan Jokowi. Dari hasil yang sudah didapatkan bahwa dari 27 informan yang menerima kemenangan Jokowi hanya 10 informan. Sedangkan yang tidak menerima terdapat 17 informan, dari hasil ini dapat dinyatakan bahwa kemenangan Presiden Jokowi tidak *legitimate* di Kota Palembang.

Kata Kunci : Legitimasi Politik

ABSTRACT

This study discusses the political legitimacy of the people of Palembang City to President Joko Widodo's Victory in the 2019 Presidential Election. This study uses a descriptive research type and qualitative approach where this qualitative method is a tool to analyze the legitimacy or recognition of the people of Palembang City towards the victory of President Joko Widodo in the 2019 presidential election. The results of this study found that from 27 Palembang City informants taken from 18 Palembang City Sub-Districts, 10 informants said they accepted President Joko Widodo's victory by arguing that in the leadership of President Jokowi Widodo, they admitted that they were quite satisfied with the very advanced infrastructure development. On the other hand, economic assistance from the Government greatly helped the economic needs of the middle to lower classes, so the community claimed to be satisfied with the performance of President Joko Widodo and some also said that inevitably had to accept it because the law had endorsed President Joko Widodo's victory in the 2019 presidential election. While 17 informants did not accept the victory of President Joko Widodo because 17 informants argued that in the leadership of President Joko Widodo they as a society increasingly difficult in the economic field and they argued that many of President Jokowi's leadership did not comply with the rules, some argued that in the Jokowi victory suspected fraud and they thought that in Jokowi's leadership. From the results that have been obtained, from 27 informants who received Jokowi's victory, only 10 informants. Whereas those who did not receive 17 information, from this result it could be stated that President Jokowi's victory was not legitimate in Palembang.

Keywords: Political Legitimacy

DAFTAR ISI

HalamanJudul.....	
HalamanPersetujuanPembimbing	ii
HalamanPengesahan	iii
HalamanPernyataan.....	iv
HalamanMotto danPersembahan	v
Abstrak.....	vii
Daftar Isi	ix
DaftarTabel	xi
DaftarGambar.....	xii
DaftarBagan	xiii
Kata Pengantar	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. PerumusanMasalah	8
C. TujuanPenelitian	9
D. KegunaanPenelitian.....	9
1. KegunaanTeoritis	9
2. KegunaanPraktis	9
E. TinjauanPustaka	9
F. KerangkaTeori.....	17
G. MetodologiPenelitian	26
1. Pendekatan/MetodePenelitian	26
2. Data danSumber Data	26
3. TeknikPengumpulan Data	27
a. Wawancara.....	27
b. Dokumentasi	28
4. LokasiPenelitian.....	28
5. TeknikAnalisis Data	29
H. SistematikaPenulisanLaporan	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Informan setiap kecamatan Kota Palembang.....	26
Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palembang	35
Tabel 2.2	Jarak Dari Kecamatan Ke Ibukota Kotamadya di Kota Palembang	36
Tabel 2.3	Jumlah Sekolah, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar Menurut Kecamatan di Kota Palembang	38
Tabel 2.4	Jumlah Sekolah, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama Menurut Kecamatan di Kota Palembang	39
Tabel 2.5	Jumlah Sekolah, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Keatas Menurut Kecamatan di Kota Palembang	40
Tabel 2.6	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palembang	43
Tabel 2.7	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kota Palembang	45
Tabel 2.8	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Kota Palembang	45
Tabel 2.9	Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden di Kota Palembang	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Presiden Joko Widodo	48
Gambar 2.2	Wakil Presiden Ma'ruf Amin	50

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Kerangka Pemikiran	25
-----------	--------------------------	----

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul, **“Legitimasi Politik Masyarakat Kota Palembang Terhadap Kemenangan Presiden Joko Widodo Pada Pilpres 2019”**.

Skripsi ini disusun sebagai tugas paripurna sebagai Mahasiswa Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial Strata Satu pada Program Studi Ilmu Politik. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, kepada:

1. Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.D sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Yenrizal, M.Si sebagai Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ainur Ropik, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
5. Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
6. Andi Candra Jaya, M.Hum sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang sekaligus Dosen Pembimbing I skripsi saya.

7. Erik Darmawan, S.IP., M.H.I sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
8. Hatta Azzuhri, M.Si. sebagai Dosen pembimbing II skripsi saya.
9. Seluruh Staff Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
10. Masyarakat Kota Palembang.
11. Semua pihak yang turut terlibat dalam membantu pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat hal-hal yang harus diperbaiki dan masih banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Palembang, 06 November 2019

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan ketatanegaraan pemilu umum (pemilu) merupakan instrument penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilik kedaulatan dalam Negara Indonesia adalah rakyat, artinya kekuasaan negara dikelola oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.¹ Demokrasi merupakan salah satu sistem yang digunakan di Indonesia. Diterimanya konsep demokrasi disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa konsep ini merupakan tata pemerintahan yang paling unggul dibandingkan dengan tata pemerintahan lainnya.

Demokrasi sebagai suatu sistem politik yang telah menempati stratum teratas yang diterima oleh banyak negara termasuk Indonesia sendiri karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks.

Demokrasi sebagai suatu metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.² Jadi

¹ Ninis Ristiani Septiliana, *“Hubungan Antara Pemahaman Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Dengan Sikap Demokrasi Pada Siswa Kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karanganyar”* Skripsi (Perpustakaan. Uns.ac.id : 2011) h..1. t.d.

² Heru Nugroho, *“Demokrasi dan Demokratisasi : Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indoneisa”* Jurnal pemikiran sosiologi, Vol.1, No.1, 2012. h. 2

dengan kata lain dapat diungkap bahwa demokrasi adalah suatu bentuk metode penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara.

Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan. Oleh karena itu, setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi.

Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan adanya pemilu, diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem penggiliran kekuasaan. Pemilu juga memberikan peluang bagi terpentalnya sejumlah partai politik dari parlemen pada setiap pemilu berikutnya. Dengan demikian, kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang tidak serta merta menjadikan partai politik yang berada di parlemen lupa sehingga setiap partai politik tidak dapat mempertahankan kekuasaannya.³

³ Sarbaini , SH. MH. “*Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum*” Jurnal Inovatif, Vol.7 No.1, 2015. h.107.

Peserta pemilu adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Partai politik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan politik di pemerintah yang didasarkan pada pemilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat.

Secara universal pemilu adalah instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif sehingga dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.⁴ Dalam hasil pemilu atau siapapun yang berhak menduduki jabatan sebagai pemimpin, pemilu tentu berkaitan dengan legitimasi politik. Legitimasi itu sendiri menentukan masyarakat mengakui atau tidak terhadap pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan nya sebagai kepala negara.

⁴*Ibid.* h.107.

Secara etimologi, legitimasi berasal dari bahasa latin yaitu *Lex* yang berarti hukum. Secara istilah, legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan. Legitimasi berarti suatu aturan yang menyangkut keabsahan atau mengandung pengakuan secara formal dan merupakan kualitas otoritas yang di anggap sah.

Ada kode hukum tersendiri yang diciptakan untuk membuat suatu tindakan dianggap sah atau menyimpang. Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, legal, dan legitim. Jadi, secara sederhana, legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan perbuatan dengan hukum yang berlaku, baik peraturan hukum formal, etis, adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah.

Suatu sistem politik dapat lestari apabila sistem politik secara keseluruhan mendapat dukungan, seperti penerimaan dan pengakuan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi diperlukan tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk unsur – unsur sistem politik. Jadi, legitimasi dalam arti luas adalah dukungan masyarakat terhadap sistem politik, sedangkan dalam arti sempit legitimasi merupakan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang.⁵

Tiga sumber utama legitimasi menurut Weber dalam Ekawati yaitu *“People may have faith in a particular political or social order because it has been there for a long time (tradition), because they have faith in the rulers (charisma), or because they trust its legality –specifically the rationality of the*

⁵ Muhliadi, *“Kekuasaan Dan Legitimasi Politik Menurut Ibn Khaldun”*, Skripsi (Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Uin Alauddin Makassar : 2013) h.30, t.d.

rule of law” (orang bisa memiliki kepercayaan dalam tatanan politik atau sosial tertentu untuk waktu yang lama (tradisi) karena mereka memiliki kepercayaan kepada penguasa (karisma) atau karena mereka percaya pada legalitas-khususnya rasionalitas aturan hukum).

Berdasarkan teori tersebut, pemerintah mendapatkan keabsahan sangat tergantung pada pandangan masyarakat berdasarkan kebiasaan (tradisi) karena faktor karismatik dan atau disebabkan oleh kerangka pandang terhadap rasionalitas aturan hukum.⁶

Pada pemilu 17 April 2019, pesta demokrasi kembali diselenggarakan serentak seluruh Indonesia yang melibatkan masyarakat Indonesia dalam hal ini sekaligus memilih calon presiden dan calon legislatif. Hal yang menarik dalam pemilu kali ini adalah dipertemukannya kembali persaingan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden periode 2019-2024.

Seperti yang kita ketahui pada pilpres tahun 2014 lalu, kedua calon ini sudah bersaing untuk memperebutkan kekuasaan sebagai presiden dan pada tahun 2014 kala itu yang berhasil menduduki sebagai kepala negara yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Pada tahun 2019, kedua calon ini bersaing kembali untuk merebutkan kekuasaan sebagai kepala Negara. Berbagai upaya dilakukan oleh kedua kubu ini untuk meraih kemenangan, salah satunya dengan mempengaruhi masyarakat agar tertarik kepada mereka dan bersedia memilih salah satu di antara mereka.

⁶ Ely Nor Ekawati, “*Legitimasi Politik Pemerintahan Desa (Studi Pengunduran Diri Kepala Desa Di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar)*”, Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal, Vol.1 No.2, 2012, h. 60.

Jika dilihat ditahun 2014 lalu di Kota Palembang sendiri dimenangkan oleh Prabowo, dari hal itu masyarakat Kota Palembang lebih mendukung Prabowo dibandingkan mendukung Jokowi, tetapi nyatanya dari penghitungan suara seluruh Indonesia Prabowo dinyatakan kalah dan Jokowi sebagai pemenang dan ditetapkan sebagai presiden. Pada tahun 2019 ini tentunya dipihak Prabowo pastinya tidak mengharap kekalahan yang sama untuk kedua kalinya.

Maka dari itu, pihak Prabowo berupaya keras dalam pemilu kali ini agar memenangkan pilpres guna untuk meyakinkan masyarakat Prabowo mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang adil, makmur, religius, dan bermartabat dalam bingkai persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

Sedangkan, pihak Jokowi tidak mau kalah begitu saja, dalam hal ini pihak Jokowi sering berkampanye dan kerap memamerkan pencapaiannya terkait pembangunan infrastruktur. Pasangan ini sering berjanji jika dia dipercayai kembali untuk menjadi presiden akan merampungkan sejumlah proyek infrastruktur yang belum selesai dalam lima tahun pertama dalam kepemimpinannya. Jokowi juga mempunyai Visi yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Pada 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin sebagai pemenang pemilihan presiden 2019 dengan raihan 85.607.362 suara atau 55,50 persen

dari total suara sah 154.257.601 suara. Sementara pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendapat 68.650.239 suara sah atau 44,50 persen dari total suara sah. Hasil itu berdasarkan rekapitulasi nasional penghitungan suara pemilu 2019 di Jakarta, Selasa dini hari.⁷

Berdasarkan hasil pengumuman pemilu, di tahapan selanjutnya, KPU akan menetapkan pasangan calon presiden terpilih. Akan tetapi, dalam hal keputusan KPU ini, paslon no urut 2 tidak menerima keputusan itu disebabkan menurut paslon no urut 2 banyak kejanggalan dan kecurangan terhadap penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU untuk memenangkan paslon No urut 1.

Berdasarkan keputusan KPU tersebut membuat paslon No urut 2 tidak merasa puas, maka dari itu pada paslon no 2 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) gunanya untuk meminta keadilan, tetapi pada tanggal 21 Juni 2019 Mahkamah Konstitusi mengumumkan bahwa gugatan yang diajukan oleh paslon no 2 ditolak, dan secara otomatis pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai pemenang pilpres yang sebelumnya sudah diumumkan oleh KPU.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, tentunya banyak menimbulkan pendapat masyarakat yang berbeda - beda terhadap kemenangan presiden Joko Widdodo, khususnya masyarakat Kota Palembang yang menimbulkan adanya pro dan kontra dalam kemenangan Presiden Joko Widodo. Secara legalitas pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin di sahkan secara

⁷<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190521020825-32-396686/kpu-tetapkan-jokowi-maruf-pemenang-pilpres-2019>. diakses tgl 01 Juli 2019 pukul 20.30 WIB.

hukum sebagai pemenang pilpres 2019, tetapi secara legitimasi pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin belum tentu diakui oleh masyarakat sebagai Presiden, khususnya masyarakat Kota Palembang.

Penelitian ini berfokus kepada masyarakat Kota Palembang untuk mencari tahu apakah yang mengakui terhadap kemenangan Presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 dan menerima Joko Widodo sebagai Presiden terpilih pada pilpres 2019 atau apakah justru masyarakat Kota Palembang tidak mengakui Joko Widodo sebagai Presiden terpilih pada pilpres 2019.

Menariknya di Kota Palembang sendiri faktanya di menangkan suara paslon no urut 2 dengan jumlah 61.27 %, sementara pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin cuma mendapatkan suara 38.73 % saja.⁸ Hal inilah yang menarik untuk ditelusuri dalam penelitian yang peneliti teliti dengan mayoritas di Kota Palembang banyak yang mendukung paslon no urut 2 dan faktanya juga pada pilpres 2019 di Kota Palembang di menangkan suara paslon no urut 2. Dengan banyaknya pendukung Prabowo di Kota Palembang, apakah kemenangan Jokowi tersebut diterima oleh masyarakat Kota Palembang, hal inilah yang di telusuri peneliti dalam penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan rincian latar belakang di atas, adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimanakah legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 ?

⁸www.kpu.go.id. diakses tanggal 20 agustus 2019, pukul 22.15 wib.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, antara lain :

1. Agar mengetahui legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atas penelitian yang diharapkan penulis, ialah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menyumbangkan pemikiran politik mengenai legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan pembaca dan peneliti mengenai legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan Presiden Joko Widodo pada pilpres 2019.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini, peneliti menganalisis terhadap penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Legitimasi Politik. Adapaun penelitian yang berkaitan dengan Legitimasi Politik telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya dan memiliki perbedaan terhadap penelitian yang akan dibahas oleh peneliti, antara lain:

Pertama, Penelitian dari Ahmad Taufan Damanik dengan judul *Relasi Kekuasaan, Kepentingan Dan Legitimasi Dalam Analisa Politik*.⁹ Penelitian ini menjelaskan pasca reformasi, pemerintah otoriter orde baru membangun liberalisasi politik besar - besaran. Secara teoritis, seharusnya liberalisasi politik akan melahirkan kebebasan dan kesetaraan politik serta pada akhirnya keadilan sosial. Nyatanya, alih - alih mendapatkan hak - hak politik maupun hak ekonomi, rakyat justru tetap jauh dari proses politik dalam arti proses pengambilan keputusan menyangkut kebijakan publik. Dalam hal ini lah sikap apatisme masyarakat kian tinggi terhadap politik dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan politik semakin rendah.

Metode penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan dokumen. Analisis menggunakan diskursus analisis dan pendekatan penelitian ini menggunakan sistem politik.. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perekonomian yang ditetapkan oleh pemerintah membuat masyarakat merasa dirugikan dan pemerintah pun tidak melibatkan masyarakat dalam hal keputusan kebijakan. Hal inilah yang membuat masyarakat menjadi apatis terhadap kegiatan politik yang dibuat oleh pemerintah dan mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat begitu rendah dalam hal proses politik.

Dari penelitian di atas sudah membahas *Relasi Kekuasaan, Kepentingan Dan Legitimasi Dalam Analisa Politik* berupa penelitian yang membahas tentang kebijakan pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat, dan membuat masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik,

⁹ Ahmad Taufan Danamik, “*Relasi Kekuasaan, Kepentingan Dan Legitimasi Dalam Analisa Politik*”, Jurnal Politeia, Vol.4 No.1. 2012. .

Sedangkan, bedanya dengan penelitian yang di teliti oleh peneliti berjudul *legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019*, menjelaskan tentang pengakuan masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan Presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 dan apakah Presiden Joko Widodo masih mendapatkan Legitimasi dari masyarakat dengan kemenangannya.

Kedua, Penelitian dari Ely Nor Ekawati, dengan judul *Legitimasi Politik Pemerintahan Desa (Studi Pengunduran Diri Kepala Desa Di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar)*,¹⁰ penelitian ini menjelaskan tentang fenomena legitimasi politik pemerintahan desa Cindai Alus, yaitu kepala desa di desa itu didesak masyarakat untuk mengundurkan diri dari tahta kekuasaannya dengan cara demonstrasi.

Pendesakan masyarakat terhadap kepala desa Cindai Alus untuk mengundurkan diri dari jabatannya disebabkan faktor kepemimpinan yang kurang *responsiveness* terhadap tuntutan masyarakat, faktor lainnya kurang mampu berhubungan baik dengan badan permusyawaratan Desa, dan tidak profesionalisme dalam menjalankan pemerintahan desa.

Berdasarkan penelitian di atas menjelaskan tentang *Legitimasi Politik Pemerintahan Desa (Studi Pengunduran Diri Kepala Desa Di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar)* dan masyarakat medesak kepala desa agar mengudurkan diri dari jabatan nya di karenakan tidak ada kepedulian terhadap tuntutan masyarakat dan tidak professional dalam

¹⁰Ely Nor Ekawati, *Loc. Cit.*

menjalankan pemerintahan desa, sedangkan peneliti meneliti tentang *legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019*, dan tidak akan membahas tentang pemerintahan desa.

Ketiga, Penelitian dari Handrix Chris Haryanto, dkk, dengan judul *Bagaimanakah Persepsi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Elit Politik ?*¹¹, penelitian ini menjelaskan bagaimana persepsi kepercayaan masyarakat Jakarta terhadap elit politik, dalam arti elit politik ialah lebih mengarah ke individu atau sekelompok seseorang yang berkecimpung di dunia politik dan pihak yang mengelola Negara. Berdasarkan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam ranah politik khususnya kepercayaan masyarakat terhadap para elit politik harus dibangun dengan karakter - karakter yang terlihat memiliki motif yang baik dan erat dengan norma.

Hal inilah terlihat dari penilaian partisipan mengenai elit politik yang dapat dipercaya dengan penggambaran karakter - karakter berupa kejujuran, tanggung jawab integritas, peduli, bermoral, tegas, kompeten, transparan dan bijaksana. Selain hal tersebut, faktor - faktor yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap para elit politik erat kaitannya dengan persepsi partisipan terhadap kebohongan, korupsi, bermasalah, mementingkan diri sendiri, tidak kompeten, berkakas, tidak bertanggung jawab, tidak transparan dan menyalahgunakan kekuasaan.

¹¹ Handrix Chris Haryanto, dkk. "*Bagaimana Persepsi Keterpercayaan Masyarakat Terhadap Elit Politik ?*" Jurnal Psikologi, Vol.42 No.3. 2015.

Berdasarkan penelitian di atas menjelaskan tentang bagaimana persepsi kepercayaan masyarakat terhadap para elit politik, penelitian ini untuk mengidentifikasi bagaimana persepsi masyarakat khususnya kota Jakarta dalam mempercayai para elit politik dalam menjalankan tugas ketatanegaraan. Sedangkan, bedanya dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah bagaimana *legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019*. Dan lokasi yang diteliti oleh peneliti di kota Palembang.

Keempat, penelitian dari Rusli Isa dengan judul *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Legitimasi Kepemimpinan Di Era Otonomi Daerah*.¹² Dalam penelitian ini membahas mengenai Pilkada langsung, pada mulanya antusiasme masyarakat menyongsong penyelenggaraan pilkada langsung tampak begitu tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Antusiasme itu tak hanya berkaitan dengan terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk memilih dan menentukan secara langsung kepada daerahnya, melainkan juga berkenaan dengan harapan atau ekspektasi terhadap para kepala daerah hasil pilkada langsung, dengan adanya pilkada langsung masyarakat menginginkan pemimpin yang berkualitas. Akumulasi kekecewaan terhadap praktek pemerintahan lokal sekitar lima tahun terakhir tampaknya menjadi faktor penting dibalik harapan masyarakat tersebut.

¹² Rusli Isa, “*Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Legitimasi Kepemimpinan Di Era Otonomi Daerah*” Jurnal Inovasi, Vol.6 No.2. 2009.

Berdasarkan penjelasan penelitian di atas membahas tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin. Sedangkan, bedanya dengan penelitian yang di teliti oleh peneliti adalah bagaimana *legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019*.

Kelima, penelitian dari Taufikkurrahman dengan judul *Legitimasi Pemberhentian Keanggotaan DPR / DPRD Oleh Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif Dengan Sistem Proporsional Terbuka*.¹³ Penelitian ini mengkaji tentang legitimasi terhadap partai politik dalam memberhentikan anggotanya yang sedang menduduki kursi DPR / DPRD hasil pemilihan umum legislatif yang dilakukan secara proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka dipahami sebagai model dari konsep kedaulatan rakyat.¹⁴

Berdasarkan hal ini wakil rakyat yang terpilih merupakan representasi dari rakyat yang mewakili kepadanya. Maka wakil rakyat yang terpilih tidak dapat diberhentikan status keanggotaannya oleh siapapun termasuk partai politik yang telah menjadi media dalam proses kontestasi. Tetapi dalam hal ini pemberhentian keanggotaan DPR / DPRD oleh partai politik didasarkan pada pasal 12 UU partai politik dan pasal 239 UU MD3 yang memberikan

¹³ Taufikkurrahman, "*Legitimasi Pemberhentian Keanggotaan DPR / DPRD Oleh Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif Dengan Sistem Proporsional Terbuka*" Jurnal Nuansa, Vol.15 No.1.2018.

¹⁴ Mikail, Kiki. "PEMILU DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam Di Tahun 2019". *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 15, no. 1 (April 7, 2016): 107-148. Accessed January 31, 2020. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/444>.

kewenangan kepada partai politik untuk mengusulkan pemberhentian keanggotaan kepada lembaga DPR / DPRD. Berdasarkan kewenangan pemberhentian tersebut telah terlegitimasi secara hukum, tetapi dalam konsep proporsional terbuka tidak mendapat legitimasi.

Berdasarkan penjelasan penelitian di atas membahas tentang legitimasi pemberhentian keanggotaan DPR / DPRD oleh Partai Politik, secara hukum Partai Politik tersebut terlegitimasi, tetapi secara proporsional terbuka tidak mendapat legitimasi. Sedangkan, penelitian yang peneliti teliti adalah bagaimana *legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019*, secara hukum Presiden Joko Widodo sah sebagai presiden terpilih dan secara legitimasi apakah Presiden Joko Widodo terlegitimasi.

Keenam, penelitian dari Nico Oktario Adytyas dengan judul *Legitimasi Partai Politik Gerindra “Modal Dan Struktur Peluang Gerindra Merebut Legitimasi Parlemen.”*¹⁵ Berdasarkan penelitian ini, menjelaskan bahwa Partai Gerindra sebagai partai baru dalam tahun itu sudah mencuri perhatian masyarakat dan mendapatkan suara cukup signifikan pada tahun 2014.

Dapat dilihat bahwa sistem partai Gerindra berjalan. Namun, focus partai tidak dominan pada pemenuhan aspirasi rakyat. Partai Gerindra lebih banyak berperan sebagai kendaraan politik Prabowo untuk masuk dalam bursa capres 2014 agar mendapatkan legitimasi dari parlemen. Adapun modal utama Gerindra sehingga berhasil mendapatkan legitimasi parlemen adalah modal

¹⁵ Nico Oktario Adytyas, dkk. “*Legitimasi Partai Politik Gerindra (Modal Dan Struktur Peluang Gerindra Merebut Legitimasi Parlemen)*” Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, Vol.18 No.1. 2018.

simbol. Prabowo sudah sejak awal menjadi simbol Partai Gerindra. Dan tidak ada pembeda lain untuk menyaingi Prabowo dalam Partai Gerindra.

Berdasarkan penelitian di atas menjelaskan bagaimana Partai Gerindra sebagai partai baru dalam masa itu sudah menjadi perhatian masyarakat, tetapi itu bukan hal utama yang dibahas dalam penelitian ini, hal utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Partai Gerindra mendapatkan legitimasi dari parlemen agar Prabowo masuk dalam bursa capres 2014. Sedangkan, bedanya dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, peneliti akan meneliti bagaimana legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan Presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 dan tidak akan membahas legitimasi politik dari parlemen.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang diteliti oleh penelitian terdahulu berbeda dengan penulis teliti, di karenakan penelitian dengan judul *legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019*, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan Presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 dan bertujuan untuk mengetahui pengakuan masyarakat terhadap kemenangannya.

Dengan judul peneliti yang peneliti sudah teliti tidak ditemukan sebelumnya yang meneliti tentang *legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019*, dalam penelitian ini yang peneliti teliti dapat dinyatakan bahwa ini baru pertama kali dilakukan.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teori sebagai alat acuan dan kerangka dasar untuk menganalisa data yang didapatkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori legitimasi dari David Beetham sebagai alat untuk menjelaskan legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019.

David Beetham menyatakan dalam bukunya *the legitimation of power* kekuasaan hanya dapat dikatakan sah jika tiga kondisi terpenuhi¹⁶, yaitu :

1. Kekuasaan harus dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan

Tingkat legitimasi pertama dan paling dasar adalah aturan yang sesuai dengan definisi hukum yang telah dibuat. Kekuasaan dapat dikatakan sah pada tingkat pertama jika diperoleh dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. David Beetham menyebut aturan yang mengatur perolehan dan penguasaan kekuasaan sebagai 'aturan kekuasaan. Aturan ini mungkin tidak tertulis sebagai konvensi informal, atau aturan tersebut dapat diformalkan dalam kode hukum atau penilaian.

Tekanan terhadap formalisasi muncul di sebagian besar masyarakat dari kebutuhan untuk menyelesaikan perselisihan tentang kekuasaan dengan membuat aturan baik prasyarat dan sangat tidak dapat diberlakukan, Tetapi masih ada wewenang yang cukup besar untuk

¹⁶ David Beetham (1988), *The Legitimation Of Power*, Tottenham : Palgrave Houndmills. h.15.

konvensi, atau 'kebiasaan dan praktik, bahkan di mana formalisasi hukum berjalan dengan baik. Masih ada banyak ruang lingkup untuk perselisihan tentang hukum meskipun fitur karakteristik dari sistem hukum adalah adanya otoritas tertinggi yang pada akhirnya diakui.

Menurut Beetham Kebalikan dari legitimasi sendiri aturan adalah sebagai kekuasaan yang tidak sah di mana ia berada disisi yang bertentangan dengan aturan (pengambilalihan, perampasan, kudeta), atau dieksekresikan dengan cara yang bertentangan atau melebihi aturan tersebut. Akuisisi kekuasaan secara ilegal biasanya memiliki lebih banyak keuntungan, karena lebih banyak tersebar luas. konsekuensi untuk legitimasi dari pada beberapa pelanggaran atau pelanggaran dalam pelaksanaannya, meskipun itu tergantung pada keseriusan pelanggaran, di mana aturan kekuasaan dapat berbicara tentang kondisi legalitas.¹⁷

2. Aturan harus dibenarkan dan merupakan keyakinan bersama dari pemerintah dan yang diperintah

Dengan sendirinya, validitas hukum tidak cukup untuk mengamankan legitimasi karena aturan-aturan di mana kekuasaan diperoleh dan dilaksanakan sendiri membutuhkan pembenaran. Ini adalah tingkat kedua legitimasi, kekuasaan dapat dikatakan sah jika aturan kekuasaan dapat dibenarkan dalam hal kepercayaan yang dimiliki oleh pihak pemerintah dan pihak yang diperintah.

¹⁷ *Ibid*, h.16

Kekuasaan harus diperoleh dari sumber otoritas yang sah, peraturan harus menetapkan bahwa mereka yang berkuasa memiliki kualitas yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang diperintah dan struktur kekuasaan harus dilihat untuk melayani kepentingan umum yang dapat diakui, dan bukan sekadar kepentingan pihak yang berkuasa. Pembeneran ini pada gilirannya bergantung pada kepercayaan yang ada di masyarakat tertentu tentang apa yang merupakan sumber otoritas yang sah; tentang kualitas apa yang sesuai untuk menjalankan kekuasaan dan bagaimana orang datang untuk memilikinya dan beberapa konsepsi tentang kepentingan bersama, manfaat timbal balik, atau kemasyarakatan yang dibutuhkan sistem kekuasaan untuk memuaskan.

Tidak ada masyarakat yang dicirikan oleh keseragaman kepercayaan sepenuhnya. Memang, salah satu ciri khas hubungan kekuasaan adalah perbedaan keadaan, peluang, dan nilai-nilai antara kelompok pemerintah dan yang diperintah. Namun tanpa keyakinan yang tepat yang didefinisikan di atas dibagikan antara yang memerintah dan yang diperintah. Memang di antara pihak yang diperintah sendiri, tidak ada dasar di mana pembeneran untuk aturan kekuasaan dapat menemukan keberagaman.¹⁸

Tentu saja apa yang dianggap sebagai pembeneran yang memadai atau memadai akan lebih terbuka untuk diperdebatkan daripada apa yang sah secara hukum, dan tidak ada penulis utama yang ingin menyelesaikan

¹⁸ *Ibid*, h.17

pertanyaan semacam itu; namun batas-batas yang jelas ditentukan oleh logika dan keyakinan masyarakat tertentu tentang pembenaran apa yang masuk akal di dalamnya.

Level atau dimensi legitimasi yang kedua ini berhubungan negatif atau berlawanan. Aturan kekuasaan akan kurang legitimasi sejauh mereka tidak dapat dibenarkan dalam hal keyakinan bersama, karena tidak ada dasar dari keyakinan bersama. Situasi-situasi yang berbeda ini jelas memiliki signifikansi yang sangat berbeda, tetapi mereka semua dapat digambarkan sebagai contoh, bukan karena tidak sah, melainkan karena defisit atau kelemahan legitimasi.¹⁹

3. Legitimasi harus ditunjukkan oleh ekspresi persetujuan dari pihak yang diperintah

Tingkat legitimasi ketiga melibatkan ekspresi persetujuan yang dapat dibuktikan pada pihak yang diperintah terhadap hubungan kekuasaan tertentu di mana mereka terlibat, melalui tindakan yang memberikan bukti persetujuan. Seperti yang dikatakan Beetham sebelumnya bahwa, pentingnya tindakan seperti menyimpulkan perjanjian dengan pihak yang berkuasa, bersumpah setia, atau mengambil bagian dalam pemilihan, adalah kontribusi yang mereka buat sebagai legitimasi.

Mereka melakukan ini dengan dua cara. *Pertama*, adalah bahwa mereka memiliki kekuatan yang mengikat secara subjektif bagi mereka yang telah mengambil bagian di dalamnya, terlepas dari motif yang telah

¹⁹ *Ibid*, h.18

mereka lakukan. Tindakan yang mengekspresikan persetujuan, bahkan jika dilakukan semata-mata karena kepentingan pribadi, akan memperkenalkan komponen moral ke dalam suatu hubungan, dan menciptakan komitmen normatif pada pihak yang terlibat di dalamnya.

Kedua, tindakan-tindakan semacam itu memiliki kekuatan simbolis atau deklaratris di depan umum, di mana tindakan-tindakan itu merupakan pengakuan yang tegas dari pihak yang diperintah dari posisi yang berkuasa, yang belakangan dapat digunakan sebagai konfirmasi legitimasi mereka terhadap bagian ketiga yang tidak terlibat. dalam hubungan, atau mereka yang belum mengambil bagian dalam ekspresi persetujuan.

Karena itu mereka sering dikaitkan dengan bentuk kepentingan yang mengesankan. Sekarang beberapa ahli teori akan berpendapat bahwa persetujuan adalah komponen atau kondisi legitimasi modern yang khas, dan yang khusus untuk tradisi liberal atau individualis, oleh karena itu tidak dapat relevan dengan pemahaman tentang keabsahan dalam sejarah lainnya. Namun, ini adalah untuk mempersempit konsep persetujuan kepada yang berkaitan dengan budaya individualis yaitu, bahwa hal itu harus dikaitkan dengan pilihan individu, bahwa semua orang dewasa pada prinsipnya memenuhi syarat untuk memberikan persetujuan.²⁰

Fakta bahwa kriteria pilihan antara pemerintah alternatif tidak selalu berkaitan dengan masyarakat lain tidak berarti bahwa tidak ada

²⁰ *Ibid*, h.19.

bentuk konvensional lain dari persetujuan yang sesuai dengan masyarakat tersebut dan dalam sebagian besar sejarah salah satunya etnis beberapa di antara pihak yang diperintah telah memenuhi syarat untuk memberikan persetujuan, menurut Beetham kualifikasi tersebut biasanya terkait dengan kategori kebebasan 'dalam bidang hubungan kekuasaan sosial dan ekonomi, dan dengan mereka yang dianggap sebagai anggota komunitas politik di bidang politik.

Terlebih lagi, pada usia yang memenuhi syarat diterima bahwa beberapa laki-laki dewasa dapat memberikan persetujuan atas nama orang lain (istri mereka anak-anak, klien, penyewa, bahkan keturunan) dengan cara yang tidak dapat diterima dalam budaya yang lebih individualis, kecuali mereka yang terlibat bertindak dalam kapasitas yang secara eksplisit mewakili. Oleh karena itu, apa yang dianggap sebagai persetujuan, dan dari siapa diperlukan untuk memberikan legitimasi pada yang kuat, itu sendiri merupakan masalah yang spesifik secara budaya, ditentukan oleh konvensi masyarakat tertentu dan bukan yang dapat didefinisikan secara mutlak.

Pada umumnya untuk kekuasaan yang sah di mana-mana dan bagaimanapun, adalah kebutuhan untuk mengikat setidaknya anggota paling signifikan di antara yang diperintah, melalui tindakan atau pernyataan yang secara terbuka menyatakan persetujuan, sehingga dapat membangun atau memperkuat kewajiban mereka kepada otoritas yang lebih tinggi, dan untuk menunjukkan kepada hal yang lebih luas, terhadap

legitimasi pihak yang berkuasa. Adalah dalam arti tindakan publik dari pihak diperintah yang mengekspresikan persetujuan, bahwa kita dapat dengan tepat berbicara tentang kekuasaan, bukan propaganda atau hubungan masyarakat kampanye, legitimasi yang dihasilkan oleh yang berkuasa itu sendiri.

Dan jika ekspresi persetujuan publik memberi kontribusi pada legitimasi yang berkuasa, maka penarikan atau penolakan atas persetujuan akan dengan cara yang sama mengurangi darinya. Tindakan-tindakan mulai dari non-kooperasi dan perlawanan pasif hingga pembangkangan terbuka dan oposisi militan pada pihak yang memenuhi syarat untuk memberikan persetujuan akan dengan ukuran yang berbeda mengikis legitimasi, dan semakin besar jumlahnya yang terlibat, semakin besar kejadian ini. Pada tingkat ini, lawan atau negatif dari legitimasi dapat disebut delegitimasi.

Agar kekuasaan sepenuhnya sah, maka, tiga syarat lahirnya legitimasi diperlukan, kesesuaiannya dengan aturan yang ditetapkan, membenaran aturan dengan mengacu pada keyakinan bersama, persetujuan tegas dari pihak yang diperintah, atau yang paling signifikan di antara mereka, untuk hubungan kekuasaan tertentu. Semua komponen tersebut berkontribusi pada legitimasi, meskipun sejauh mana mereka direalisasikan dalam konteks tertentu akan menjadi masalah.

Legitimasi bukan urusan semua atau tidak sama sekali. Untuk alasan ini menggunakan bagian di atas kekuatan dapat dikatakan sah sejauh itu

memiliki landasan dari 3 syarat tersebut. Setiap relasi kuasa mengetahui pelanggaran aturan atau konvensi dalam setiap masyarakat akan ada beberapa orang yang tidak menerima norma-norma yang mendasari aturan kekuasaan, dan beberapa yang menolak untuk menyatakan persetujuan mereka, atau yang melakukannya hanya di bawah tekanan nyata. Yang penting adalah seberapa luas penyimpangan ini, dan seberapa besar dalam kaitannya dengan norma dan konvensi yang mendasari yang menentukan legitimasi kekuasaan dalam konteks tertentu.

Legitimasi dapat terkikis, diperebutkan atau tidak lengkap dan penilaian tentang itu biasanya penilaian tingkat, bukan semua atau tidak sama sekali. Di atas segalanya, Beetham menunjukkan bahwa legitimasi bukan kualitas tunggal yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh sistem kekuasaan, tetapi seperangkat kriteria yang berbeda, atau beberapa dimensi yang beroperasi di tingkat yang berbeda, yang masing-masing memberikan landasan moral untuk kepatuhan atau kerja sama. pada bagian orang-orang yang berada di bawah hubungan kekuasaan tertentu.²¹

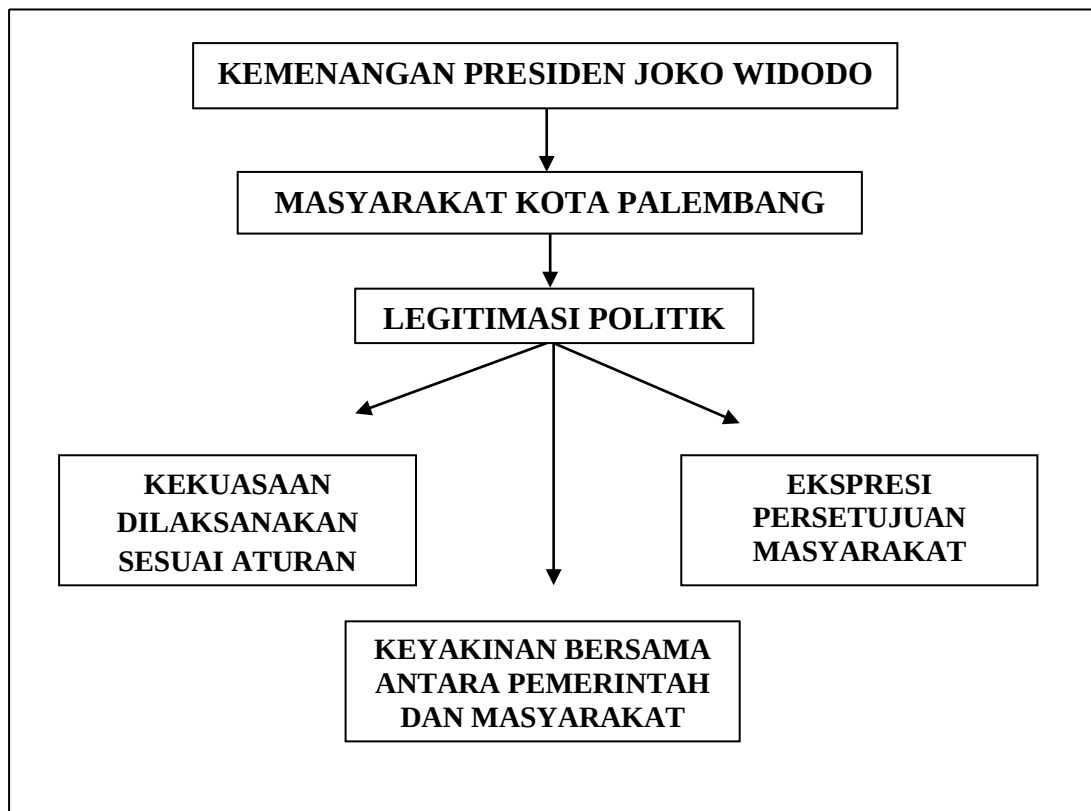
Dengan cara yang sama, kekuasaan dapat menjadi tidak sah dengan cara yang sangat berbeda, yang telah Beetham suguhkan dengan istilah yang berbeda. ilegalitas, defisit legitimasi, dan delegitimasi. kejadian norma pembenaran, perbudakan, tuntutan, kediktatoran, kudeta, agitasi separatis, mobilisasi revolusi semuanya adalah contoh di mana kekuasaan tidak memiliki unsur legitimasi, tetapi melakukannya dengan cara yang sangat berbeda.

²¹ *Ibid*, h.20.

Penilaian yang menyertai dalam bentuk dimensi yang berbeda dari kekuatan yang sah dan tidak sah yang telah Beetham bedakan, untuk memperkuat argumen teks.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas mengenai teori legitimasi yang didefinisikan oleh David Beetham, dan penelitian yang berjudul legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019, yang di teliti dengan menggunakan teori legitimasi politik, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori legitimasi David Beetham, karena teori tersebut paling tepat untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019.

BAGAN 1.1
KERANGKA PEMIKIRAN



G. Metode Penelitian

1. Pendekatan / Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif atau menggambarkan secara tepat mengenai legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang menghasilkan data yang di dapat secara mendalam dari apa yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan mengenai legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019.

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data *primer* dan data *sekunder*, data *primer* merupakan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan informan dalam penelitian ini yaitu mewakili suara masyarakat dari setiap kecamatan di Kota Palembang.

Tabel 1.1
Informan setiap kecamatan di Kota Palembang

No	Nama / Inisial	Umur	Kecamatan	Pekerjaan / Profesi
1	ID	19	Sematang Borang	Mahasiswa
2	AN	23	Ilir Barat II	Pegawai Swasta
2	AR	24	Jakabaring	Pengusaha
4	AG	22	Seberang Ulu I	Mahasiswa
5	HT	20	Sako	Pegawai Bank

6	HN	22	Plaju	Pegawai Swasta
7	BN	30	Kemuning	Gojek
8	BY	25	Gandus	Teknisi
9	YS	35	Sukarami	Pedagang
10	AD	50	Bukit Kecil	Supir
11	HS	25	Seberang Ulu II	Pegawai Swasta
12	JH	50	Ilir Timur I	Pedagang
13	RH	30	Ilir Barat I	Pegawai Swasta
14	DJ	30	Kalidoni	Pegawai Pusri
15	DW	21	Alang-alang lebar	Mahasiswa
16	MF	23	Bukit Kecil	Grab
17	SLM	45	Kertapati	Pedagang
18	SD	25	Gandus	Montir
19	MTP	50	Ilir Timur I	Guru
20	ER	50	Ilir Timur III	Guru
21	EM	45	Gandus	Petani
22	WL	40	Kemuning	Supir
23	DI	45	Ilir Barat II	Supir
24	SY	40	Alang-alang lebar	Pedagang
25	BI	30	Sako	Gojek
26	RD	25	Ilir Timur II	Buruh
27	ADT	25	Kertapati	Pegawai Swasta

Sumber : Di olah peneliti.

Sedangkan, data *sekunder* merupakan data pendukung dari data primer yaitu dukomuntasi yang di dapat dari foto-foto, berita, dan ulasan-ulasan yang mengenai legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan Presiden Jokowi pada pilpres 2019.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara satu orang atau lebih secara langsung. Wawancara berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama. Dalam metode wawancara ini, peneliti menggunakan

jenis wawancara terbuka. Dalam hal ini, peneliti akan menyiapkan pertanyaan kepada masyarakat dan melakukan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi mengenai Kemenangan Presiden Joko Widodo Pada Pilpres 2019.²²

Wawancara ini akan di tujukan ke masyarakat Kota Palembang yang terdiri dari 18 kecamatan. Informan yang diambil dari 18 kecamatan di Kota Palembang untuk meratakan suara masyarakat Kota Palembang mengenai legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019.

b. Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan data dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, seperti foto-foto, berita, maupun ulasan - ulasan yang berkaitan dengan legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019.²³

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang, menariknya penelitian ini diteliti di Kota Palembang karena dalam pemilu 17 April 2019 di Kota Palembang sendiri lebih dominan pendukung No urut 02 pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno dibanding pendukung No urut 01 pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang lebih sedikit pendukungnya.

²² Prof.Dr.Husaini Usman, M.Pd.,M.T. dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Bumi Askara. h.55.

²³*Ibid* h.69

Faktanya, di Kota Palembang dimenangkan oleh pasangan No urut 02. Hal inilah yang menarik dalam pemilihan lokasi ini dalam perspektif legitimasi politik.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data menggunakan jenis analisis data kualitatif. Dalam analisis data kualitatif berbeda dengan analisis data kuantitatif, karena data kualitatif datanya tidak dapat dihitung dan berwujud sehingga tidak dapat disusun dalam bentuk angka-angka. Untuk menganalisa data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Kemudian data-data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi dikelompokkan, digolongkan, dianalisis, dan disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Data-data tersebut diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan masalah yang akan diteliti.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan disusun dalam Empat Bab yang terdiri dari :

BAB I : Pada bab ini yang pertama yang di uraikan ialah penulisan latar belakang sebagai dasar pembahasan masalah yang di teliti, kemudian rumusan masalah, rumusan masalah sendiri sebagai bahan yang

di bahas dalam hasil penelitian, lalu tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, selanjutnya akan membahas tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu, lalu kerangka teori, teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis data yang didapatkan. Lalu metodologi penelitian yang menjelaskan metode apa yang di pakai, lalu menjelaskan data dan sumber data yang di ambil dalam penelitian, lalu teknik pengumpulan data, lokasi penelitian dan teknik analisis data.

BAB II : Pada bab ini menjelaskan secara detail lokasi yang menjadi tempat penelitian, yaitu Kota Palembang.

BAB III : Dalam bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan yang ditulis berdasarkan data yang sudah didapatkan.

BAB IV : Dalam bab terakhir dalam penulisan skripsi ini adalah penutup yang menjelaskan kesimpulan serta saran yang di peroleh dari seluruh isi pembahasan skripsi yang di dapat dari hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Palembang

Lokasi penelitian yang berjudul Legitimasi Politik Masyarakat Kota Palembang Terhadap Kemenangan Presiden Joko Widodo Pada Pilpres 2019 ialah di Kota Palembang dan berfokus pada pengakuan masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan Presiden Joko Widodo pada pilpres 2019.

Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1382 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit. Menurut Prasasti yang berangka tahun 16 Juni 682. Pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Bahkan saat ini kota Palembang masih terdapat 52,24 % tanah yang tergenang oleh air (data Statistik 1990).²⁴

Berkemungkinan karena kondisi inilah maka nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota ini sebagai Pa-lembang dalam bahasa melayu Pa atau Pe sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan; sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air (menurut kamus melayu), sedangkan menurut bahasa

²³ www.palembang.go.id, di akses tgl 27 agustus 2019, pukul 02.00 wib.

melayu-Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air.

Kondisi alam ini bagi nenek moyang orang-orang Palembang menjadi modal mereka untuk memanfaatkannya. Air menjadi sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien dan punya daya jangkauan dan punya kecepatan yang tinggi. Selain kondisi alam, juga letak strategis kota ini yang berada dalam satu jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara tiga kesatuan wilayah:

- Tanah tinggi Sumatera bagian Barat, yaitu : Pegunungan Bukit Barisan.
- Daerah kaki bukit atau piedmont dan pertemuan anak-anak sungai sewaktu memasuki dataran rendah.
- Daerah pesisir timur laut.²⁵

Ketiga kesatuan wilayah ini merupakan faktor setempat yang sangat mementukan dalam pembentukan pola kebudayaan yang bersifat peradaban. Faktor setempat yang berupa jaringan dan komoditi dengan frekuensi tinggi sudah terbentuk lebih dulu dan berhasil mendorong manusia setempat menciptakan pertumbuhan pola kebudayaan tinggi di Sumatera Selatan. Faktor setempat inilah yang membuat Palembang menjadi ibukota Sriwijaya, yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi di zaman klasik pada wilayah Asia Tenggara. Kejayaan Sriwijaya diambil oleh Kesultanan Palembang

²⁵⁴ *Ibid*

Darusallam pada zaman madya sebagai kesultanan yang disegani dikawasan Nusantara.

Sriwijaya, seperti juga bentuk-bentuk pemerintahan di Asia Tenggara lainnya pada kurun waktu itu, bentuknya dikenal sebagai Port-polity. Pengertian Port-polity secara sederhana bermula sebagai sebuah pusat redistribusi, yang secara perlahan-lahan mengambil alih sejumlah bentuk peningkatan kemajuan yang terkandung di dalam spektrum luas. Pusat pertumbuhan dari sebuah Polity adalah entreport yang menghasilkan tambahan bagi kekayaan dan kontak-kontak kebudayaan. Hasil-hasil ini diperoleh oleh para pemimpin setempat. (dalam istilah Sriwijaya sebutannya adalah datu), dengan hasil ini merupakan basis untuk penggunaan kekuatan ekonomi dan penguasaan politik di Asia Tenggara.

Ada tulisan menarik dari kronik Cina Chu-Fan-Chi yang ditulis oleh Chau Ju-Kua pada abad ke 14, menceritakan tentang Sriwijaya sebagai berikut :Negara ini terletak di Laut selatan, menguasai lalu lintas perdagangan asing di Selat.²⁶ Pada zaman dahulu pelabuhannya menggunakan rantai besi untuk menahan bajak-bajak laut yang bermaksud jahat. Jika ada perahu-perahu asing datang, rantai itu diturunkan. Setelah keadaan aman kembali, rantai itu disingkirkan. Perahu-perahu yang lewat tanpa singgah dipelabuhan dikepung oleh perahu-perahu milik kerajaan dan diserang. Semua awak-awak perahu tersebut berani mati. Itulah sebabnya maka negara itu menjadi pusat pelayaran.

²⁵ *Ibid*

Kota Palembang digambarkan adalah kota yang sangat besar, dimana jika dimasuki kota tersebut, kokok ayam jantan tidak berhenti bersahutan (dalam arti kokok sang ayam mengikuti terbitnya matahari). Kisah-kisah perjalanan mereka penuh dengan keajaiban 1001 malam. Pelaut-pelaut Cina mencatat lebih realistis tentang kota Palembang, dimana mereka melihat bagaimana kehidupan penduduk kota yang hidup diatas rakit-rakit tanpa dipungut pajak.

Sedangkan bagi pemimpin hidup berumah ditanah kering diatas rumah yang bertiang. Mereka mengeja nama Palembang sesuai dengan lidah dan aksara mereka. Palembang disebut atau diucapkan mereka sebagai Po-lin-fong atau Ku-kang (berarti pelabuhan lama). Setelah mengalami kejayaan diabad-abad ke-7 dan 9, maka dikurun abad ke-12 Sriwijaya mengalami keruntuhan secara perlahan-lahan.²⁷ Keruntuhan Sriwijaya ini, baik karena persaingan dengan kerajaan di Jawa, pertempuran dengan kerajaan Cola dari India dan terakhir kejatuhan ini tak terelakkan setelah bangkitnya bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.²⁸

B. Letak Geografis

Kota Palembang terletak antara 2°52' sampai 3°5' Lintang Selatan dan 104°37' sampai 104°52' Bujur Timur. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada Tahun 2017, berdasarkan SK

²⁶ *Ibid*

²⁸ Mikail, K. (2018). IJTihad POLITIK ISLAM PALEMBANG DI MASA ORDE BARU. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 6(1), 30-53.

Nomor 136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir timur III yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Batas wilayah Kota Palembang bagian utara, bagian timur, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin , bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.²⁹

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palembang 2017³⁰

NO	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Ilir Barat II	6,22	1,55
2	Gandus	68,78	17,17
3	Seberang Ulu I	8,28	2,07
4	Jakabaring	9,16	2,29
5	Kertapati	42,56	10,62
6	Seberang Ulu II	10,69	2,67
7	Plaju	15,17	3,79
8	Ilir Barat I	19,77	4,93
9	Bukit Kecil	9,92	2,48
10	Ilir Timur I	6,50	1,62
11	Kemuning	9,00	2,25
12	Ilir Timur II	10,82	2,71
13	Ilir Timur III	14,76	3,68
14	Kalidoni	27,92	6,97
15	Sako	18,04	4,50
16	Sematang Borang	36,98	9,23
17	Sukarami	51,46	12,85
18	Alang - Alang Lebar	34,58	8,63
Palembang		400,61	100,00

Sumber: Diolah dari Kota Palembang dalam angka 2018

Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61km² / 40.061 Ha dan jika dilihat dari tabel 2.1 diatas terlihat bahwa kecamatan yang paling luas di Kota Palembang adalah Kecamatan

²⁷ BPS (2018). *Kota Palembang Dalam Angka*, CV. Alief Media Grafika, h.4

²⁸ *Ibid* h.7

Gandus dengan luas 68,78 Km² atau 17,17 % dari luas keseluruhan Kota Palembang. Sementara Kecamatan Ilir Barat II merupakan Kecamatan dengan luas wilayah yang paling kecil dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Palembang dengan luas 6,22 Km² atau hanya 1,55 % dari keseluruhan luas Kota Palembang.

Tabel 2.2
Jarak Dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kotamadya
di Kota Palembang³¹

No	Kecamatan	Jara ke Kotamadya (Km)
1	Ilir Barat II	2,50
2	Gandus	11,00
3	Seberang Ulu I	4,50
4	Kertapati	14,00
5	Jakabaring	8,90
6	Seberang Ulu II	5,10
7	Plaju	8,30
8	Ilir Barat I	4,40
9	Bukit Kecil	2,10
10	Ilir Timur I	3,90
11	Kemuning	6,90
12	Ilir Timur II	4,80
13	Kalidoni	7,00
14	Ilir Timur III	6,10
15	Sako	9,50
16	Sematang Borang	9,50
17	Sukarami	11,00
18	Alang - Alang Lebar	13,00

Sumber: Diolah dari Kota Palembang dalam angka 2018.

Pada tabel 2.2 diatas, terlihat bahwa Kecamatan Kertapati merupakan Ibukota Kecamatan yang memiliki jarak terjauh dari Ibukota Kotamadya Kota Palembang yaitu berjarak 14,00 Km. Selanjutnya, Kecamatan Alang - Alang Lebar menempati posisi kedua terjauh setelah Kecamatan Kertapati yaitu 13,00 Km dari Ibukota Kotamadya Kota Palembang. Sementara untuk jarak terdekat

²⁹*Ibid*, h.8

dari Ibukota Kecamatan menuju Ibukota Kotamadya adalah Kecamatan Bukit Kecil yang hanya berjarak 2,10 Km saja dari Ibukota Kotamadya Kota Palembang. Menyusul setelahnya yaitu Kecamatan Ilir Barat II, yang hanya berjarak 2,50 Km saja dari Ibukota Kotamadya Kota Palembang.

C. Kondisi Sosial Masyarakat Kota Palembang

1. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, variable - variabel seperti jumlah gedung sekolah, jumlah murid dan jumlah guru sering kali ditampilkan untuk menggambarkan situasi pendidikan. Misalnya dua variabel terakhir diatas dapat digunakan untuk menghitung rasio murid-guru.

Pada tahun ajaran 2016/2017, Kota Palembang memiliki gedung sekolah sebanyak 918 sekolah yang terdiri atas 537 sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), 242 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS), serta 139 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) .

Selama tahun ajaran 2016/2017, jumlah murid SD sebanyak 126.700 orang, SLTP sebanyak 76.156 orang, dan murid SMA 48.516 orang.³² Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah murid disetiap level pendidikan mengalami penurunan. Sedangkan jumlah murid Madrasah Ibtidaiyah (MI), murid Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan murid Madrasah Aliyah (MA) justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah

³⁰ *Ibid*, h.95

guru yang mengajar di masing - masing sekolah pada tahun 2016/2017 ini terdiri atas 6.966 guru Sekolah Dasar, 4.306 orang guru SLTP, serta 2.941 orang guru SMA.

Tabel 2.3
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD)
Menurut Kecamatan di Kota Palembang.³³

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
1	Iilir Barat II	17	4.817	192	25.09
2	Gandus	23	5.257	246	21.37
3	Seberang Ulu I	24	6.877	752	9.14
4	Kertapati	38	9.088	444	20.47
5	Jakabaring	27	8.387	-	-
6	Seberang Ulu II	28	4.732	269	17.59
7	Plaju	31	7.747	439	17.65
8	Iilir Barat I	40	11.064	705	15.69
9	Bukit Kecil	14	3.599	289	12.45
10	Iilir Timur I	22	4.115	357	11.53
11	Kemuning	22	7.378	580	12.72
12	Iilir Timur II	29	4.820	633	7.61
13	Kalidoni	38	10.582	601	17.61
14	Iilir Timur III	24	4.594	-	-
15	Sako	20	8.488	338	25.11
16	Sematang Borang	6	2.342	118	19.85
17	Sukarami	27	17.148	665	25.79
18	Alang - Alang Lebar	16	5.665	338	16.76
Palembang		446	126.700	6.966	18.19

Sumber: Kota Palembang Dalam Angka 2018

Pada tabel 2.3 dapat dilihat bahwa Kecamatan Iilir Barat I memiliki sekolah dasar terbanyak di Kota Palembang yaitu berjumlah 40 sekolah. Sementara, jumlah siswa terbanyak justru berada di Kecamatan Sukarami dengan jumlah siswa mencapai 17.148 siswa SD.

³¹ *Ibid*, h.101

Sedangkan Kecamatan Seberang Ulu I yang memiliki jumlah guru sekolah dasar terbanyak di Kota Palembang yang berjumlah 752 guru. Secara keseluruhan jumlah murid sekolah dasar yang ada di Kota Palembang berjumlah 126.700 murid yang tersebar di 446 sekolah di Kota Palembang. Sementara pada tabel dibawah ini akan dijelaskan jumlah sekolah, murid, guru, dan rasio murid dan guru SMP menurut kecamatan di Kota Palembang 2017.

Tabel 2.4
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kota Palembang 2017.³⁴

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio murid-Guru
1	Ilir Barat I	6	2.705	148	18.28
2	Gandus	7	3.192	181	17.64
3	Seberang Ulu I	19	7.555	415	18.20
4	Kertapati	13	4.764	235	20.27
5	Jakabaring *)	-	-	-	-
6	Seberang Ulu II	12	4.228	204	20.73
7	Plaju	15	4.164	244	17.07
8	Ilir Barat I	18	5.467	321	17.03
9	Bukit Kecil	8	2.623	175	14.99
10	Ilir Timur I	12	5.041	297	16.97
11	Kemuning	11	5.353	298	17.96
12	Ilir Timur II	24	7.663	440	17.42
13	Kalidoni	17	5.972	332	17.99
14	Ilir Timur III *)	-	-	-	-
15	Sako	12	4.858	291	16.99
16	Sematang Borang	3	892	42	21.24
17	Sukarami	18	7.683	421	18.25
18	Alang - Alang Lebar	11	3.996	262	15.25
Palembang		206	76.156	4.306	17.69

Sumber: Kota Palembang Dalam Angka 2018

Pada tabel 2.4 dapat dilihat bahwa jumlah murid sekolah menengah pertama yang berada di Kota Palembang pada tahun 2017 secara keseluruhan berjumlah 76.156 siswa dengan jumlah guru 4.306 orang.

³² *Ibid*, h.103

Sementara jumlah guru terbanyak berada di Kecamatan Ilir Timur II sebanyak 440 guru dan jumlah murid terbanyak berada di Kecamatan Sukarami 7.683 murid.

Tabel 2.5
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan di Kota Palembang 2017.³⁵

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio murid-Guru
1	Ilir Barat II	4	1351	84	16.08
2	Gandus	5	1965	113	17.39
3	Seberang Ulu I	11	3523	250	14.09
4	Kertapati	5	2467	125	19.74
5	Jakabaring *)	-	-	-	-
6	Seberang Ulu II	8	2608	138	18.90
7	Plaju	9	2372	177	13.40
8	Ilir Barat I	15	7611	445	17.10
9	Bukit Kecil	1	333	18	18.50
10	Ilir Timur I	7	2599	170	15.29
11	Kemuning	9	5618	335	16.77
12	Ilir Timur II	19	7566	445	17.00
13	Kalidoni	8	2573	131	19.64
14	Ilir Timur III *)	-	-	-	-
15	Sako	5	1943	126	15.42
16	Sematang Borang	-	-	-	-
17	Sukarami	12	4493	277	16.22
18	Alang - Alang Lebar	3	1494	107	13.96
Palembang		121	48.516	2.941	16.50

Sumber: Kota Palembang Dalam Angka 2018

Jumlah sekolah menengah atas (SMA) pada tahun 2017 di Kabupaten Kota Palembang berdasarkan tabel diatas berjumlah 121 sekolah dengan jumlah murid mencapai 48.516 siswa dan guru berjumlah 2.941 orang. Sementara rasio murid dan guru terbesar berada di Kecamatan Kertapati dimana terdapat 2.467 murid dengan 125 guru.

³³ *Ibid*, h.105

2. Kesehatan

Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu adalah sebagian dari variabel-variabel yang dapat menunjukkan pencapaian pembangunan kesehatan di wilayah Kota Palembang. Pada tahun 2017, ada 35 buah rumah sakit yang terdiri atas rumah sakit pemerintah maupun swasta. Fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas berjumlah 41. Di bidang Keluarga Berencana pada tahun 2017 ini jumlah peserta KB aktif sebesar 204.989 dimana sebagian besar peserta KB aktif menggunakan metode kontrasepsi suntikan yang mencapai 36,05 persen atau sebesar 73.893 orang.

3. Agama

Jumlah agama yang ada di Kota Palembang meliputi 5 agama yaitu Islam, Katolik, Protestan, Budha dan Hindu. Diantara keseluruhan agama yang ada, agama islam memiliki pengikut terbanyak. Pada tahun 2017, 92,82 persen penduduk di Kota Palembang beragama islam. Seiring dengan banyaknya umat islam di Kota Palembang, tempat ibadah pun didominasi oleh tempat peribadatan agama Islam dengan jumlah masjid dan mushola beserta langgar sebesar 1.638 unit.³⁶

4. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 sebanyak 210,01 ribu orang (14,13%) dan terus menurun hingga 184,41 ribu orang (11,40%) pada tahun 2017. Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2015 pernah mengalami

³⁴ *Ibid*, h.96

peningkatan hingga mencapai 203,12 ribu orang (12,85%). Akan tetap, di Tahun 2016 hingga saat ini, jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan. Secara umum, persentase penduduk miskin dari Tahun 2011 sampai 2017 mengalami penurunan hingga mencapai 11,40 persen.

5. Kriminalitas

Jumlah tindak kejahatan seperti yang berkaitan dengan penganiayaan, pencurian/ perampokan, pembunuhan, penipuan, kesusilaan dan pelanggaran, yang masuk di Kepolisian Resort Kota Palembang tahun 2017 berjumlah 3.201 kasus. Secara umum, jumlah tindak kejahatan pada tahun 2017 mengalami penurunan 557 (14,82%) kasus tindak pidana dari tahun sebelumnya.³⁷

D. Penduduk dan Ketenagakerjaan

1. Kependudukan

Penduduk Kota Palembang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 1.623.099 jiwa yang terdiri atas 813.708 jiwa penduduk laki-laki dan 809.391 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Palembang mengalami pertumbuhan sebesar 1,01 %. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan

³⁵ *Ibid*, h..97

sebesar 100,53 % yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.³⁶

Kepadatan penduduk di Kota Palembang tahun 2017 mencapai 4.052 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Ilir Timur I dengan kepadatan sebesar 11.862 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Gandus sebesar 931 jiwa/Km².

Tabel 2.6
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palembang 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1	Ilir Barat II	71.267	4.39	11.458
2	Gandus	64.020	3.94	931
3	Seberang Ulu I	91.619	5.64	11.065
4	Kertapati	89.597	5.52	9.781
5	Jakabaring	90.791	5.59	2.133
6	Seberang Ulu II	104.209	6.42	9.748
7	Plaju	88.265	5.44	5.818
8	Ilir Barat I	137.863	8.49	6.973
9	Bukit Kecil	48.874	3.01	4.927
10	Ilir Timur I	77.102	4.75	11.862
11	Kemuning	91.419	5.63	10.158
12	Ilir Timur II	93.352	5.75	8.628
13	Kalidoni	111.030	6.84	7.522
14	Ilir Timur III	83.640	5.15	2.996
15	Sako	91.754	5.65	5.086
16	Sematang Borang	35.821	2.21	969
17	Sukarami	155.590	9.59	3.024
18	Alang - Alang Lebar	96.886	5.97	2.802
Palembang		1.602.071	100.00	4.052

Sumber: Kota Palembang Dalam Angka 2018.

Dari penjelasan tabel 2.6 diatas bahwa jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sukarami yaitu dengan jumlah penduduk mencapai 155.590 jiwa. Sedangkan Kecamatan Sematang Borang memiliki jumlah

³⁶ *Ibid*, h.70

penduduk yang terkecil yaitu 35.821 jiwa saja. Sementara kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan Ilir Timur I dengan kepadatan penduduk mencapai 11.862 per-km. Sedangkan Kecamatan Gandus memiliki kepadatan penduduk yang terkecil dengan jumlah kepadatan 931 per-km.

2. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja di Kota Palembang sebanyak 749.821 orang. Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, 91,80 persen diantaranya merupakan penduduk yang bekerja. Sementara tingkat pengangguran Kota Palembang pada tahun 2017 sebesar 8,20 persen. Angka Pengangguran ini dihitung dengan mendefinisikan menganggur sebagai mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dilihat dari komposisi pendidikan tertinggi yang ditamatkannya, 67,76 persen dari angkatan kerja merupakan penduduk yang telah menamatkan pendidikan sampai level SMA/ sederajat ke atas, bahkan 28,10 persen diantaranya telah menamatkan pendidikan diploma ke atas. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama dari penduduk yang bekerja di Kota Palembang, persentase terbesar penduduk laki-laki bekerja di sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan, sedangkan persentase terbesar penduduk perempuan bekerja di sector perdagangan besar, eceran, rumah

makan dan hotel. Adapun jumlah pencari kerja terdaftar menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Kota Palembang.³⁹

Tabel 2.7
Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kota Palembang 2017.

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		JUMLAH
	Laki-Laki	Perempuan	
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0	0	0
Tidak/Belum Tamat SD	0	0	0
Sekolah Dasar	5	-	5
SMP Sederajat	15	6	21
SMA Sederajat	1.774	1.053	2.827
Diploma I/II/III/Akademi	348	592	940
S1	1.056	1.089	2.145
S2	3	4	7
Jumlah	3.201	2.744	5.945

Sumber: Diolah Dari Kota Palembang Dalam Angka 2018.

Pada tabel 2.7 diatas memaparkan jumlah pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat pendidikan, dalam tabel diatas jumlah pencari kerja terbesar berada di kelompok pendidikan SMA Sederajat dengan jumlah mencapai 2.827 orang laki-laki dan perempuan. Sedangkan jumlah keseluruhan dari semua pendidikan berjumlah 5.945 orang yang mencari kerja.⁴⁰

E. Jumlah DPT dan Hasil Pilpres 2019 Di Kota Palembang

Tabel 2.8
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Kota Palembang Pada Pemilu 2019.

³⁷*Ibid*, hlm.71

⁴⁰ *Ibid*, h.85

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih		
		L	P	P+L
1.	Iilir Barat II	23.449	23.693	47.142
2.	Gandus	23.290	22.499	45.789
3.	Seberang Ulu I	31.162	30.574	61.736
4.	Kertapati	31.455	31.249	62.704
5.	Jakabaring	29.178	29.713	58.891
6.	Seberang Ulu II	33.274	32.986	66.260
7.	Plaju	33.330	33.768	67.098
8.	Iilir Barat I	48.511	49.741	98.252
9.	Bukit Kecil	16.525	17.891	34.416
10.	Iilir Timur I	25.739	28.878	53.617
11.	Kemuning	28.680	29.787	58.467
12.	Iilir Timur II	31.246	32.559	63.805
13.	Kalidoni	39.810	40.366	80.176
14.	Iilir Timur III	27.322	27.946	55.268
15.	Sako	32.377	33.188	65.565
16.	Sematang Borang	17.803	17.495	35.298
17.	Sukarami	54.610	56.817	111.427
18.	Alang - Alang Lebar	29.496	30.697	60.193
Palembang		557.257	568.847	1.126.104

Sumber: Diolah Peneliti dari KPU Kota Palembang.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di setiap Kecamatan di Kota Palembang pada pemilu tahun 2019 secara keseluruhan berjumlah 1.126.104 orang yang terdiri dari 557.257 laki-laki dan 568.847 perempuan. Dan jumlah DPT terbesar berada di Kecamatan Sukarami dengan jumlah keseluruhan 111.427 orang, dengan jumlah laki-laki 54.610 orang dan jumlah perempuan 56.817 orang, sedangkan DPT paling rendah berada di Kecamatan Bukit Kecil, dengan jumlah keseluruhan 34.416 orang, dengan jumlah laki-laki 16.525 orang dan jumlah perempuan 17.891 orang.

Penelitian ini berfokus pada kemenangan Presiden Joko Widodo pada pilpres 2019, dan lokasi penelitian ini di Kota Palembang, pada pilpres tahun 2019 pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai pemenang

secara total suara keseluruhan di Indonesia, tetapi pada lokasi penelitian ini di kota Palembang dimenangkan oleh pasangan Prabowo Sandi.

Pada pilpres 2019 khususnya di Kota Palembang, Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Salahudin Uno berhasil memenangkan suara di Kota Palembang dengan jumlah suara yang cukup besar yaitu 522.628 suara, total suara yang sah atau 61,20 % suara. Sementara pasangan nomor urut 1 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mendapatkan 329.993 suara atau 38,73 % dari total keseluruhan suara yang sah di Kota Palembang pada pilpres tahun 2019. Rincian jumlah suara seluruh Kecamatan di Kota Palembang yang tertulis dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019 di Kota Palembang⁴¹

No.	Kecamatan	Ir.H.Joko Widodo dan Prof.Dr.KH.Ma'ruf Amin	H.Prabowo Subianto dan H.Sandiaga Salahudin Uno
1	Ilir Barat II	11.922	21.343
2	Gandus	12.995	24.241
3	Seberang Ulu I	17.233	28.966
4	Kertapati	20.638	29.619
5	Jakabaring	19.048	29.055
6	Seberang Ulu II	19.767	35.001
7	Plaju	19.947	30.732
8	Ilir Barat I	25.137	47.298
9	Bukit Kecil	7.113	13.107
10	Ilir Timur I	21.761	17.794
11	Kemuning	18.118	27.578
12	Ilir Timur II	14.582	26.098
13	Kalidoni	22.125	38.230
14	Ilir Timur III	16.198	23.389
15	Sako	20.942	33.519
16	Sematang Borang	9.554	14.221
17	Sukarami	36.102	52.837
18	Alang - Alang Lebar	17.199	29.600
	Jumlah	329.993	522.628

³⁸ www.Pilpres2019.KPU.go.id. Diakses tgl 02 Agustus 2019, Pukul 19.30 wib.

	Persentase	38.73 %	61.27 %
--	-------------------	----------------	----------------

Sumber : www.kpu.go.id

Dari tabel 2.9 dapat dilihat bahwa pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin hanya menang di satu Kecamatan saja yaitu Kecamatan Ilir Timur. Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno berhasil menang di 17 Kecamatan di Kota Palembang yaitu di Kecamatan Ilir Barat II, Gandus, Seberang Ulu I, Kertapati, Jakabaring, Seberang Ulu II, Plaju, Ilir Barat I, Bukit Kecil, Kemuning, Ilir Timur II, Kalidoni, Ilir Timur III, Sako, Sematang Borang, Sukarami dan Alang - Alang Lebar.

Sedangkan perhitungan nasional pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin unggul dengan perolehan total suara 55.32 %, sedangkan lawannya pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno cuma memperoleh total suara 44.68 %. Dari hasil penghitungan suara yang diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) pusat pada tanggal 21 Mei 2019 dini hari, KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengumumkan bahwa paslon No urut 1 pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pemenang pada pilpres 2019.

F. Profil Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih

1. Profil Presiden

Gambar 2.1
Presiden Joko Widodo



Sumber : www.viva.co.id.

Joko Widodo lebih dikenal dengan sebutan Jokowi, ia lahir di Surakarta, Jawa tengah, 21 Juni 1961, dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi Notomiharjo. Jokowi adalah anak pertama dari empat bersaudara. Ketiga adiknya perempuan semua : Lit Sriyatini, Ida Yati dan Titik Relawati Jokowi dibesarkan dari keluarga sederhana. Bahkan dia mengalami beberapa kali pindah rumah karena digusur. Sejak kecil ia tidak mau menyusahkan orang tuanya, ia membantu orang tuanya dengan cara menjadi pengojek payung hujan, kuli panggul dan jualan aneka barang.

Jokowi menghabiskan pendidikan dasar hingga sekolah menengah di Solo, sedangkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada tahun 1985, Jokowi lulus kuliah dalam usia 24 tahun. Tidak lama setelah menyandang gelar insinyur, Jokowi menikah dengan Iriana di Solo pada usia 25 tahun. Berbekal pengalaman dalam mengelola bisnis mebel, Jokowi berani terjun ke dunia politik. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi mencalonkan sebagai walikota Solo. Pada usia 44 tahun Jokowi menjadi walikota Solo periode 2005-2010.⁴²

Untuk periode kedua 2010-2015, ia terpilih lagi. Baru dua tahun memimpin kota Solo pada periode keduanya, Jokowi diminta PDIP kembali untuk bertarung dipemilihan gubernur DKI Jakarta. Kampanye blusukannya saat bekerja mengantarkan Jokowi menang. Pada usia 51 tahun memimpin DKI Jakarta untuk periode 2012-2017. Karier Jokowi

³⁹ www.viva.co.id. diakses tgl 14 November 2019, pukul 00.59 wib.

berlanjut, baru menjalankan tugas Gubernur 2 tahun, Jokowi dicalonkan PDIP untuk bertarung pada pemilu 2014, ia pun menjadi presiden terpilih pada usia 53 tahun periode 2014-2019. Lalu di tahun 2019 kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Hasilnya menang lagi sebagai presiden periode 2019-2024.

2. Profil Wakil Presiden

Gambar 2.2

Wakil Presiden Ma'ruf Amin



Sumber : Kompas.com

KH Ma'ruf Amin dipilih Joko Widodo dan partai koalisi pengusungnya sebagai calon wakil presiden yang maju bersama Jokowi pada pemilihan 2019. Ma'ruf Amin pernah terjun dipolitik, ia juga mengalami jabatan yang panjang dalam jabatan politik. Ma'ruf Amin

mempunyai pengalaman legislative dari tahun 1971 hingga 1999, selain itu ia aktif diberbagai organisasi kemasyarakatan sejak tahun 1964. Terakhir ia merupakan anggota badan pertimbangan ideology pancasila bersama Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya.⁴³

Ma'ruf Amin (lahir di Tangerang, Banten, 11 Maret 1943) merupakan ulama yang kini menjabat sebagai Rais Aam Nahdatul Ulama (NU) dan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pada Kamis, 9 Agustus 2018 ia dideklarasikan Jokowi sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi pada Pemilihan Presiden 2019.

Pada masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ma,ruf Amin duduk sebagai anggota dewan pertimbangan presiden. Karier atau pekerjaan lainnya sebagai berikut :

- Guru Sekolah di Jakarta Utara (1964-1970)
- Pendakwah (1964)
- Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdatul Ulama (Unnu), Jakarta (1968)
- Direktur dan Ketua Yayasan Lembaga pendidikan dan Yayasan Al-Jihad (1976)

⁴⁰ www.viva.co.id. diakses tgl 14 November 2019, pukul 01.59 wib.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legitimasi Politik Masyarakat Kota Palembang Terhadap Kemenangan Presiden Joko Widodo Pada Pilpres 2019

Penelitian ini membahas mengenai legitimasi masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 dengan menggunakan landasan teori David Beetham. Seperti konsep kekuasaan dan kewenangan, legitimasi juga merupakan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Artinya, apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat atautkah tidak.

Apabila masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat maka kewenangan itu dikategorikan sebagai berlegitimasi. Maksudnya, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Menurut David Beetham⁴⁴ untuk memelihara suatu legitimasi itu diperlukan 3 bagian yaitu :

⁴⁴⁴ David Beetham (1988), *The Legitimation Of Power*, Tottenham : Palgrave Houndmills. h.15.

1. Kekuasaan harus dijalankan berdasarkan dengan aturan yang sudah dibuat.
2. Aturan harus dibenarkan dari keyakinan bersama antara pemerintah dan yang diperintah.
3. Pihak yang diperintah harus menunjukkan ekspresi persetujuan terhadap yang berkuasa.

Menurut Beetham Agar kekuasaan sepenuhnya sah, maka, tiga syarat dalam membentuk legitimasi ini sangat diperlukan, kesesuaiannya dengan aturan yang ditetapkan, pembenaran aturan dengan mengacu pada keyakinan bersama, persetujuan tegas dari pihak yang diperintah, atau yang paling signifikan di antara mereka, untuk hubungan kekuasaan tertentu. Semua komponen tersebut berkontribusi pada legitimasi.⁴⁵

Seperti halnya yang kita ketahui pada pelaksanaan pilpres ditahun 2019 yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tentu banyak pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat, lebih khususnya lagi kepada masyarakat Kota Palembang yang lebih dominan mendukung Prabowo dibanding mendukung Jokowi, seperti yang kita ketahui bahwa di Kota Palembang sendiri dimenangkan oleh suara Prabowo dengan total suara 61,27 %, sedangkan suara Jokowi hanya mendapatkan total suara 38,73 %.⁴⁶

Dukungan masyarakat Kota Palembang terhadap Prabowo bukan hanya di pilpres 2019 ini saja, melainkan masyarakat Kota Palembang telah mendukung Prabowo sejak pilpres di tahun 2014. Dalam hal ini kemenangan

⁴⁴⁵ *Ibid*, h.16

⁴⁴⁶ www.Pilpres2019.Kpu.go.id. diakses tanggal 10 November 2019, pukul 02.00 wib.

presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 dapat diterima oleh masyarakat Kota Palembang yang mayoritas pendukung Prabowo atau justru tidak diterima. Hal inilah yang akan dibahas pada bagian ini dengan menggunakan landasan teori legitimasi David Beetham yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berlandaskan teori tersebut apakah masyarakat Kota Palembang telah memenuhi syarat dalam melegitimasi kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 atau justru sebaliknya.

1. Kekuasaan Harus Berjalan Berdasarkan Aturan.

Pada suatu pemerintahan khususnya di Indonesia tentunya mempunyai aturan yang sudah disepakati bersama dengan masyarakat itu sendiri, jika kekuasaan tidak mentaati aturan yang sudah dibuat sebelumnya maka masyarakat tidak menerima suatu kekuasaan yang melanggar aturan tersebut. Menurut Beetham kekuasaan dapat dikatakan sah jika diperoleh dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dan Kebalikan dari legitimasi sendiri aturan adalah sebagai kekuasaan yang tidak sah di mana ia berada disisi yang bertentangan dengan aturan (pengambilalihan, perampasan, kudeta), atau dipinggirkan dengan cara yang bertentangan atau melebihi aturan tersebut.⁴⁷

Berdasarkan kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 tentu kekuasaan berada dikendaliannya, dengan memegang suatu kekuasaan tentu banyak penilaian dari pihak yang diperintah yaitu masyarakat, salah satunya penilaian dari masyarakat yang berinisial ID

⁴⁴ *Ibid*, h.16

yang berdomisili dikecamatan Sematang Borang Kota Palembang, menurutnya bahwa dalam kepemimpinan Jokowi :

“Menurut saya dalam kepemimpinan Jokowi ini belum bisa dikatakan baik, karena lihat saja kemarin didalam berita ia ingin mengikuti cara presiden Amerika Serikat, jika membuat satu peraturan yang baru maka peraturan yang sudah ada harus di pangkas lebih dari satu peraturan, hal inilah yang membuat saya menilai dalam kepemimpinannya yang kurang baik karena mengapa harus memangkas peraturan yang lama lebih dari satu jika ingin membuat peraturan yang baru”⁴⁴⁸

Dari penjelasan ID diatas bahwa ia menyatakan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan presiden Joko Widodo yang menurutnya yang serta merta ingin merubah peraturan yang sudah ada tanpa memikirkan apa yang akan terjadi kedepannya, dan juga pihak pemerintah tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada masyarakat, gunanya peraturan itu untuk kepentingan bersama, seharusnya sebagai pemerintahan yang baik pemerintah meminta persetujuan terlebih dahulu kepada wakil rakyat jika ingin membuat aturan yang baru dan akan memangkas peraturan yang lama.

Seperti hal nya pendapat dari masyarakat berinisial AN yang berdomisili di kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, menurutnya bahwa dalam pemerintahan yang dipimpin presiden Joko Widodo banyak sekali yang melanggar aturan dalam kepemimpinannya, ungkapnya :

“Menurut saya dalam kepemimpin presiden Jokowi masih banyak yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, contohnya pada saat Jokowi menjadi presiden, ia berani

⁴⁴⁸ Masyarakat inisial ID, domisili kecamatan Sematang Borang. Wawancara tgl 09 November 2019.

memakai dana haji untuk pembangunan infrastruktur, hal itu jelas melanggar peraturan yang sudah ditetapkan”⁴⁹

Dari penjelasan diatas bahwa AN merasa sangat tidak puas dengan cara kepemimpinan presiden Joko Widodo yang melanggar aturan perundang-undangan bahwa dana haji itu uang umat bukan uang negara, dana haji bisa dipakai jika untuk kepentingan kemaslahatan umat, jika dana haji itu dipakai dengan alasan untuk kemaslahatan umat ya boleh-boleh saja selagi untuk kenyamanan umat yang akan melaksanakan ibadah haji. Jika dana haji itu dipakai untuk kepentingan yang lain, maka jelas itu sangat melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

Adapun pendapat lain dari masyarakat berinisial AR yang berdomisili di kecamatan Jakabaring Kota Palembang, ia berpendapat bahwa :

“Dalam asministratif seharusnya seorang presiden itu taat pada aturan yang berlaku agar bisa menjalankan sistem pemerintahan yang baik. Sedangkan presiden terpilih sekarang dalam pencalonan dan pemilihan dia memilih tidak ada cuti seharipun dari kursinya sebagai presiden”⁵⁰

Berdasarkan penjelasan masyarakat yang berinisial AR tersebut bahwa untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan yang taat pada aturan yang sudah ditetapkan maka presiden seharusnya mentaati aturan yang sudah ditetapkan. Pada masa pencalonan atau dalam proses pemilihan presiden seharusnya seorang presiden harus mengambil cuti

⁴⁴⁹ Masyarakat inisial AN , domisili kecamatan Ilir Barat II. Wawancara tgl 09 November 2019.

⁴⁵⁰ Masyarakat inisial AR, domisili kecamatan Jakabaring. Wawancara tgl 09 November 2019.

dimasa pencalonan tersebut, tetapi yang seperti kita ketahui bahwa presiden Jokowi tidak mengambil cuti pada masa pencalonan atau masa pemilihan presiden untuk periode 2019-2024. Hal inilah yang membuat masyarakat menilai pada pemerintahan yang dipimpin presiden Joko Widodo belum mentaati aturan yang sudah ditetapkan.

Masyarakat sendiri pada umumnya hanya bisa mengkritik apa yang dilakukan oleh pihak pemerintahan, karena kembali lagi ke paham demokrasi bahwa kedaulatan itu berada ditangan rakyat, jadi masyarakat bebas untuk berpendapat mengenai sebuah pemerintahan, seperti halnya pendapat dari masyarakat yang berinisial AG yang berdomisili di kecamatan Seberang Ulu I :

“Menurut saya ada beberapa peraturan pemerintahan yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat yang mana pada saat itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, belakangan ini pemerintahan Jokowi tidak peduli dengan peraturan yang dibuat oleh DPR, contohnya seperti revisi UU MD3 yang salah satunya aturan tersebut bahwa DPR tidak boleh dikritik, menurut saya DPR sebelum membuat peraturan tersebut pastinya sudah berdiskusi terlebih dahulu kepada pemimpin negara”⁵¹

Menurut penjelasan AG tersebut ia menilai bahwa dalam pemerintahan presiden Joko Widodo kurang peduli dengan masyarakat secara luas, dilihat dari pendapat AG tersebut bahwa masyarakat ingin presiden Jokowi memprotes apa yang sudah dibuat pihak DPR yang dianggap merugikan masyarakat dengan membuat peraturan yang tidak

⁴⁵¹ Masyarakat inisial AG, domisili kecamatan Seberang Ulu I. Wawancara tgl 09 November 2019.

masuk diakal, jika masyarakat tidak boleh lagi mengkritik suatu pemerintahan artinya negara ini bukan menganut sistem demokrasi lagi, seperti yang kita ketahui bahwa paham demokrasi itu ialah bebas berpendapat.

Pada sistem pemerintahan dimana pemerintahan itu seharusnya menampung saran dan kritik dari pihak yang diperintah, karena diindonesia sendiri menganut sistem demokrasi yang dimana rakyat lah sebagai penguasa dan pemerintah hanya sebagai pelayan terhadap rakyat. Rakyat hanyalah menginginkan pemerintahan yang baik dan yang mengerti terhadap keluhan rakyatnya. Adapun pendapat dari masyarakat yang berinisial HT yang berdomisili di kecamatan Sako Kota Palembang, ia berpendapat dimasa pemerintahan Jokowi masih terdapat yang melanggar aturan perundang-undangan, menurutnya :

“Menurut saya dimasa pemerintahan presiden Jokowi belum mentaati aturan yang sudah ditetapkan, karena lihat saja pada waktu itu pihak pemerintah mengimpor beras pada saat petani panen raya, seharusnya pada saat petani lokal panen pemerintah tidak boleh mengimpor beras”⁵²

Berdasarkan pendapat dari HT tersebut bahwa dimasa pemerintahan presiden Joko Widodo belum mentaati aturan yang sudah dibuat, pada masa petani lokal pihak pemerintahan justru mengimpor beras, dalam undang-undang pasal 3 ayat 1 tentang ketentuan impor beras, yang isinya ialah beras hanya dapat diimpor diluar masa 1 bulan sebelum panen raya dan 2 bulan setelah panen raya. Artinya bahwa pemerintah

⁴⁵² Masyarakat inisial HT, domisili kecamatan Sako. Wawancara tgl 09 November 2019.

impor pada saat petani panen raya dapat dikatakan bahwa pemerintah menjatuhkan harga pasaran hasil panen petani lokal, karena kemana lagi petani akan menyalurkan hasil panennya jika pihak pemerintah sudah mengimpor beras dari luar negeri.

Jika peraturan yang sudah ditetapkan tidak dipatuhi oleh pihak pemerintah bagaimana sistem pemerintah negara ini bisa dikatakan baik, seharusnya pemerintah harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan agar masyarakat tidak merasa selalu dirugikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Seperti halnya kebakaran hutan dan lahan sudah berlangsung lama di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Kota Palembang sendiri merasakan dampaknya yang sehari-hari menghirup udara yang tidak sehat karena tebalnya kabut asap, sehingga aktivitas masyarakat sehari-hari terganggu. Seperti yang diungkapkan masyarakat yang berinisial NH yang berdomisili di kecamatan Plaju di Kota Palembang tersebut, bahwa menurutnya :

“Menurut saya dalam kebakaran hutan dan lahan tersebut menurut berita artikel yang saya baca, bahwa dalam permasalahan karhutla tersebut ada beberapa menteri yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan tersebut karena kepentingan pribadi, dalam masalah ini juga Jokowi dinilai tidak melakukan penanganan yang baik dan lambat terhadap karhutla tersebut dan juga tidak mengungkap perusahaan-perusahaan yang terlibat akan karhutla tersebut guna membuka sebuah lahan”⁵³

⁵⁰ Masyarakat inisial HN, domisili kecamatan Plaju. Wawancara tgl 10 November 2019.

Dari pendapat NH tersebut bahwa penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dinilai lamban dan seolah-olah pemerintah membiarkan kebakaran hutan dan lahan tersebut, jika ingin di usut tuntas pihak mana saja yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan tersebut, karena yang mempunyai wewenang hanyalah pihak pemerintah. Tetapi tidak dipungkiri bahwa pihak pemerintah mungkin sudah bekerja semaksimal mungkin untuk membuat kebakaran hutan dan lahan tersebut tuntas, agar masyarakat tidak terkena dampak dari karhutla tersebut.

Dengan pendapat-pendapat dari masyarakat Kota Palembang tersebut bahwa dimasa pemerintahan yang dipimpin presiden Joko Widodo belum begitu baik di mata masyarakat, karena masyarakat menilai bahwa dalam kepemimpinan presiden Joko Widodo masih banyak yang tidak mentaati sebuah aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Beetham pemerintahan yang bisa dianggap sah apabila pemerintahan tersebut menjalankan dengan benar apa yang sudah menjadi aturan yang sebelumnya sudah ditetapkan.⁵⁴ Artinya dalam konteks ini masyarakat masih menganggap dalam kepemimpinan presiden Jokowi belumlah begitu baik dengan masih banyaknya pihak pemerintah yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

⁵¹ Beetham, *Op.Cit*, h.16

2. Aturan harus dibenarkan dari keyakinan bersama antara pemerintah dan yang diperintah.

Di suatu negara tentunya pasti ada pihak yang memerintah (presiden) dan pihak yang diperintah (masyarakat), dalam hal itu pihak memerintah tidak bisa dipisahkan dari pihak yang diperintah, karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Maka dalam suatu negara jika suatu pemerintahan yang ingin membuat suatu kebijakan harus melalui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga pemerintah bisa membuat suatu kebijakan untuk kepentingan bersama. Menurut Beetham kekuasaan dapat dikatakan sah jika aturan kekuasaan dapat dibenarkan dalam hal kepercayaan yang dimiliki oleh pihak pemerintah dan pihak yang diperintah.⁵⁵

Kekuasaan harus diperoleh dari sumber otoritas yang sah, peraturan harus menetapkan bahwa mereka yang berkuasa memiliki kualitas yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang diperintah dan struktur kekuasaan harus dilihat untuk melayani kepentingan umum yang dapat diakui, dan bukan sekadar kepentingan pihak yang berkuasa. Artinya bahwa dari pihak pemerintah dan pihak yang diperintah ini harus mempunyai kesepakatan bersama dan harus mempunyai kepercayaan satu sama lain. Seperti halnya dalam menentukan sebuah kebijakan yang gunanya untuk kepentingan bersama, masyarakat harus diikutsertakan dalam pembuatan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

⁵² *Ibid*, h.17

Pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Joko Widodo apakah masyarakat merasa di ikutsertakan dalam menentukan suatu kebijakan yang berguna untuk kepentingan bersama. Menurut pendapat dari masyarakat yang berinisial BN yang berdomisili dikecamatan Kemuning Kota Palembang, bahwa pemerintahan yang dipimpin presiden Joko Widodo belum melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan.

“Saya sebagai masyarakat belum merasa puas dengan kinerja presiden Jokowi dalam menjadi seorang pemimpin, karena menurut saya dalam kepemimpinan Jokowi ada yang saya tidak senang, contohnya dalam kemenangannya ini, baru saja dia dinyatakan menang BPJS akan dinaikan dan BBM akan dinaikan, menaikkan BBM tanpa sepengetahuan masyarakat ”⁵⁶

Kenaikan BBM dan BPJS memang sebenarnya untuk menstabilkan perekonomian diindonesia, tetapi dengan semua biaya kehidupan yang semakin mahal masyarakat akan semakin kesulitan dalam membiayai kehidupan sehari-hari, dimasa kepemimpinan presiden Joko Widodo masyarakat merasa semakin dibohongi, pada kenaikan BBM yang tanpa sepengetahuan masyarakat tiba-tiba harga BBM dinaikan dilarut malam, seperti pendapat yang sama yang dikeluhkan oleh masyarakat yang berinisial BY yang berdomisili di kecamatan Gandus Kota Palembang :

“Saya merasa kurang senang dalam kepemimpinan Jokowi karena tiba-tiba BBM naik dilarut malam tanpa sepengetahuan masyarakat, menurut saya Jokowi juga tidak tegas dalam memimpin Negara, karena dia sering mengacuhkan keluhan masyarakat, dan tidak memahami urusan Negara, jadi menurut saya dia Cuma sekedar menjabat saja ”⁵⁷

⁵³ Masyarakat inisial BN, domisili kecamatan Kemuning. Wawancara tgl 12 Agustus 2019.

⁵⁴ Masyarakat inisial BY, domisili kecamatan Gandus. Wawancara tgl 15 Agustus 2019.

Menjadi seorang pemimpin memang tidaklah mudah untuk mengayomi semua apa yang diinginkan masyarakat, apalagi disebuah Negara yang besar dengan wilayah yang luas seperti Indonesia, tetapi menjadi seorang pemimpin Negara sudah menjadi kewajiban untuk menyayomi seluruh masyarakatnya, seharusnya seorang pemimpin mendengarkan keluhan masyarakatnya dengan meminta pendapat terlebih dahulu melalui wakil rakyat sebelum melakukan sesuatu yang akan berdampak ke masyarakat.

Masyarakat Kota Palembang masih banyak yang merasa tidak puas dalam terpilihnya kembali Joko Widodo sebagai presiden, dikarenakan dalam kepemimpinan presiden Joko Widodo mereka sebagai masyarakat merasa semakin di miskinakan dari sisi ekonomi, dimasa pemerintahan presiden Joko Widodo perekonomian semakin menyulitkan masyarakat, adapun pendapat dari masyarakat berinisial YS yang berdomisili di kecamatan Sukarami Kota Palembang, ia berpendapat bahwa :

“Saya merasa kurang senang Jokowi terpilih kembali menjadi presiden karena semenjak Jokowi menjadi presiden ekonomi semakin tinggi, menurut saya di era kepemimpinan Jokowi perekonomian semakin buruk, saya sebagai pedagang sangat merasakan perekonomian sangat menyusahkan kami sebagai pedagang, lalu BPJS akan dinaikan juga, jadi saya merasa sangat susah di era kepemimpinan Jokowi”⁵⁸

Berdasarkan pendapat YS tersebut bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Joko Widodo masih sangat membuat masyarakat kecil atau tidak mampu semakin terpuruk dengan melonjaknya harga

⁵⁵ Masyarakat inisial YS, domisili kecamatan Sukarami. Wawancara tgl 14 Agustus 2019.

bahan-bahan pokok membuat seorang pedagang merasa semakin disulitkan untuk menentukan harga dagangannya, karena menurut masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang seperti YS tersebut jika menjual dagangan dengan harga yang tidak seperti biasanya maka minat pembeli semakin berkurang.

Dengan perekonomian yang semakin melonjak maka tentu semakin tinggi angka kemiskinan dimasyarakat dan angka kriminal tentunya semakin meninggi dikarenakan kemiskinan yang melanda dan lapangan pekerjaan yang tidak tersedia begitu banyak. Seperti halnya pendapat dari masyarakat yang berinisial AD yang berdomisili di kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, berprofesi sebagai supir angkutan umum, menurutnya kebijakan-kebijakan yang dibuat presiden saat ini sangat bertentangan dengan profesinya, karena dengan kebijakan pembangunan LRT dan Trans Musi membuat para pekerja angkutan umum semakin kesusahan mencari penumpang dan semakin lama semakin berkurang pendapatan sehari-harinya :

“Kami sebagai supir angkutan umum menjadi lemah di era Jokowi, mencari uang semakin susah, rakyat banyak yang menganggur, pendapat kami sebagai supir angkutan umum jadi menurun semenjak banyaknya transportasi yang di bangun pemerintah, jadi kami menjadi semakin susah untuk mencari nafkah untuk keluarga, dengan banyaknya rakyat yang menganggur pun jadi makin banyak yang berbuat kejahatan / kriminal, jadi bagaimana rakyat mau mencari uang jika lapangan pekerjaan tidak disediakan, jika rakyat berbuat kriminal dihukum seberat-beratnya”⁵⁹

⁵⁶ Masyarakat inisial AD, domisili kecamatan Bukit Kecil. Wawancara tgl 13 Agustus 2019.

Berdasarkan pernyataan diatas, dimasa kepemimpinan presiden Joko Widodo Masyarakat Kota Palembang masih banyak yang mengeluh dengan kurangnya lapangan pekerjaan, di zaman yang modern hidup serba mahal tentu masyarakat makin sulit untuk menafkahi keluarganya dengan lapangan pekerjaan yang tidak banyak, tentu semua masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan, bagi yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Maka sebagian masyarakat yang sudah kehabisan akal untuk mencari uang akan terpengaruh ke sisi negatif dengan pengaruh lingkungan hidup mereka berbuat kejahatan agar mendapatkan uang.

Masyarakat Kota Palembang banyak yang mengeluh dengan terpilihnya kembali presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Karena dengan pernyataan presiden Joko Widodo secara terbuka kepada masyarakat luas bahwa ia sebagai pemimpin berencana memindahkan ibukota negara Indonesia ke tanah pulau Kalimantan. Tentu dengan pengungkapan rencana atau keputusan presiden Jokowi tersebut membuat banyak tanggapan masyarakat yang menilai bahwa presiden Jokowi tidak memikirkan dana yang akan dikeluarkan untuk memindahkan sebuah ibukota negara. Seperti hal nya pendapat dari masyarakat yang berinisial HS yang berdomisili di kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, menurutnya :

“Menurut saya dalam rencana Jokowi yang ingin memindahkan ibukota negara itu, seperti kesan nya ia itu ingin membangun dan memper maju wilayah yang akan ditetapkan menjadi ibukota, menurut saya presiden Jokowi tidak ada program kerja yang lain apa selain infrakstruktur, untuk memindahkan ibukota negara itu butuh biaya yang sangat

besar, mending dana tersebut digunakan mengalokasikan tingkat kemiskinan pada masyarakat”⁶⁰

Berdasarkan penejlasan masyarakat yang berinisial HN bahwa dalam pemindahan ibukota tersebut membutuhkan biaya yang sangat banyak, dan dana itu pun dari mana lagi kalau tidak lain dari berhutang lagi, dengan dana pemindahan ibukota tersebut tentu hutang Indonesia semakin membengkak lagi, benar apa yang dikatakan HS tersebut bahwa dari pada memikirkan bagaimana mengenai pemindahan ibukota ditanah Kalimantan, lebih baik pemerintah memikirkan kestabilan perekonomian masyarakat, dengan tingginya tingkat kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia tentu ini masalah yang sangat serius disbanding pemindahan ibukota yang membutuhkan dana yang sangat banyak.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah terkadang membauat masyarakat resah atas keputusan pemerintah yang bertujuan agar memecahkan permasalahan yang ada pada masyarakat, tetapi dalam hal menentukan suatu keputusan atau kebijakan pihak pemerintah yang dipimpin presiden Joko Widodo tidak melibatkan pendapat masyarakat.

Akibatnya mayarakat bukan semakin puas atas apa yang sudah pemerintah lakukan, tetapi justru masyarakat semakin resah atas apa yang dibuat oleh pemerintah, karena itu masyarakat Kota Palembang yang mayoritasnya pendukung prabowo menilai dalam pemerintahan presiden

⁵⁷ Masyarakat inisial HS, domisili kecamatan Seberang Ulu II. Wawancara tgl 11 November 2019.

Jokowi tidak begitu baik, karena masih banyak masyarakat yang mengeluh kesulitan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pihak pemerintahan.

Menurut Beetham kekuasaan dapat dikatakan sah jika aturan kekuasaan dapat dibenarkan dalam hal kepercayaan yang dimiliki oleh pihak pemerintah dan pihak yang diperintah.⁶¹ Menurut pemahaman Beetham tersebut artinya bahwa antara pemerintah dengan pihak yang diperintah itu seharusnya saling membenarkan dan saling mempercayai satu sama lain, jika pemerintah tidak mempercayai pendapat dari masyarakatnya dan masyarakat tidak percaya terhadap keputusan pemerintah, jika dilihat dari terori yang diungkapkan Beetham bahwa pemerintahan presiden Jokowi tidak mendapat legitimasi dari masyarakat.

3. Pihak diperintah menunjukkan ekspresi persetujuan terhadap yang berkuasa.

Pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai pemenang pada pilpres 2019 dan di sahkan presiden dan wakil presiden periode 2019 – 2024, pada kemenangan pasangan presiden Joko Widodo dan Ma'ruf ini tentu menuai pendapat masyarakat Kota Palembang yang mayoritas lebih mendukung lawan Jokowi yaitu Prabowo, dalam hal ini apakah masyarakat Kota Palembang yang mayoritas pendukung Prabowo bisa menunjukkan ekspresi persetujuan terhadap kemenangan presiden Joko Widodo.

⁵⁸ Beetham, *Op.Cit.* h.17

Menurut Beetham persetujuan yang dapat dibuktikan pada pihak yang diperintah terhadap hubungan kekuasaan tertentu di mana mereka terlibat, melalui tindakan yang memberikan bukti persetujuan.⁶² Artinya bahwa agar pemerintahan mendapatkan legitimasi maka pihak yang diperintah yaitu masyarakat harus menunjukkan ekspresi persetujuan dengan terlibat langsung terhadap suatu kekuasaan seperti adanya pemilu dan adanya kompetisi partai dan adanya peraturan yang mengesahkan. Secara legalitas presiden Joko Widodo disahkan menjadi presiden, tetapi secara legitimasi presiden Joko Widodo belum tentu mendapat pengakuan atau kepercayaan dari masyarakat terhadap kemenangannya pada pilpres 2019.

Seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa di Kota Palembang sendiri mayoritas mendukung paslon No urut 2 yaitu pasangan Prabowo dan Sandiaga. Dalam hal ini apakah masyarakat Kota Palembang dapat menunjukkan ekspresi persetujuan terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Adapun ekspresi persetujuan dari masyarakat yang berinisial JH yang berdomisili di kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang :

“Saya secara pribadi dan dari hati nurani mengakui kemenangan Jokowi pada pilpres 2019, dan saya juga mengakui Jokowi menjadi presiden saat ini, pada awalnya saya memang menginginkan Prabowo yang menang, tapi nyatanya Jokowi yang menang, ya hukum saja mengesahkan ya kita sebagai masyarakat harus menerima, karena bila kita tidak mengakui Jokowi menjadi presiden berarti sama saja kita tidak punya

⁵⁹ Beetham, *Op.Cit.* h.18

presiden, sakit hati rasanya jika Negara ini di bilang tidak ada pemimpin”⁶³

Seperti yang dikatakan masyarakat yang berinisial JH tersebut kita sebagai masyarakat tidak mengakui adanya presiden, maka sama saja kita tidak mempunyai seorang pemimpin negara, karena salah satu konsep terbentuknya suatu Negara adanya pemerintahan dan seorang pemimpin, jika dalam suatu Negara tidak ada yang memimpin, maka tidak layak disebut dengan suatu Negara.

Dapat diartikan bahwa masyarakat yang berinisial JH tersebut menunjukkan ekspresi persetujuannya terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019, tetapi memang awalnya ia adalah pendukung prabowo dan menginginkan prabowo yang menang, tetapi hukum sudah mengesahkan dan ia sebagai masyarakat harus menerima dan menyetujui apapun keputusan hukum. Seperti ekspresi persetujuan dari masyarakat yang berinisial RH yang berdomisili di kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, yang pada awalnya ia menginginkan prabowo yang menjadi presiden :

“Pada Awalnya saya memang pendukung prabowo, tetapi yang menang Jokowi secara hukum, kita sebagai masyarakat harus mentaati hukum dan saya pribadi mengakui Jokowi sebagai presiden, karena saya menilai dari kinerja dia sebagai seorang pemimpin, semenjak dia menjadi presiden pembangunan di Indonesia ini semakin maju, seperti pembangunan jalan Tol antar Kota sudah banyak yang di bangun termasuk jalan Tol

⁶⁰ Masyarakat inisial JH, domisili kecamatan Ilir Timur I. Wawancara tgl 15 Agustus 2019.

Palembang-Lampung dan pembangunan LRT juga sudah terlaksanakan di Kota Palembang”⁶⁴

Adapun ekpresi persetujuan yang sama dari masyarakat yang berinisial DJ yang berdomisili di kecamatan Kalidoni Kota Palembang, bahwa ia menyetujui di karenakan hukum sudah mengesahkan kemenangan presiden Jokowi, KPU sudah mengumumkan presiden Jokowi sebagai pemenang pilpres 2019 dan MK juga sudah menegaskan bahwa kemenangan presiden Jokowi tidak ada kecurangan, berikut pernyataannya :

“Dari saya pribadi mengakui Jokowi saat ini menjadi presiden, karena mau tidak mau ya harus mengakui, hukum saja sudah mengesahkan, dari KPU yang telah mengumumkan bahwa Jokowi sebagai pemenang pilpres dan dari MK juga menegaskan bahwa tidak ada kecurangan dalam penghitungan suara dan MK juga sudah menetapkan Jokowi sebagai pemenang, jujur saya pertamanya menginginkan Prabowo sebagai presiden, tetapi ya sekarang kan Jokowi yang sudah ditetapkan sebagai pemenang. Dan masyarakat Indonesia juga masih menginginkan Jokowi menjadi presiden, jadi saya pribadi saat ini mengakui Jokowi menjadi presiden”⁶⁵

Berdasarkan penjelasan masyarakat diatas bahwa menurutnya ia pribadi mengakui kemenangan presiden Joko Widodo Karena KPU dan MK sudah mempertegas bahwa kemenangan presiden Jokowi tidak terdapat bukti kecurangan, jika terdapat adanya kecurangan pasti pihak hukum tidak mengesahkan kemenangannya tersebut, tetapi dengan MK mengesahkan kemenangan presiden Joko Widodo membuat kepercayaan masyarakat bertambah kepada kemenangan presiden Jokowi tersebut

⁶¹ Masyarakat inisial RH, domisili kecamatan Ilir Barat I. Wawancara tgl 17 Agustus 2019.

⁶² Masyarakat inisial DJ, domisili kecamatan Kalidoni. Wawancara tgl 18 Agustus 2019.

memang sah. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat yang awalnya pendukung Prabowo tetapi pada akhirnya ia menerima kemenangan presiden Jokowi, menurut penjelasan DW yang berdomisili di kecamatan Alang-alang lebar tersebut :

“Saya awalnya memang memilih Prabowo sebagai presiden, tetapi yang ditetapkan sebagai pemenang pilpres ialah Jokowi, saya sendiri menerima kemenangan Jokowi tersebut, karena saya juga menyukai sosok Jokowi, menurut saya kinerjanya yang bagus dan kepribadiannya juga yang baik dan santun, tetapi saya tidak memilihnya ia karena menurut saya di belakang ia atau orang-orang yang berpihak kepada ia mempunyai kepentingan masing-masing, itu yang saya tidak suka”⁶⁶

Menurut penjelasan yang dikemukakan oleh DW tersebut bahwa ia sangat menerima kemenangan presiden Joko Widodo karena ia menilai kinerja presiden Jokowi selama menjadi pemimpin cukuplah baik dan kepribadiannya juga sangat menjadi panutan karena kesopanannya yang sangat lemah lembut dalam berbicara. Menurutnya bahwa ia memilih dan lebih mendukung Prabowo karena di pihak presiden Jokowi terdapat orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi dengan memanfaatkan situasi dengan mencalonkannya kembali presiden Joko Widodo pada pilpres 2019.

Adapun persetujuan masyarakat yang berinisial MF berdomisili di kecamatan Bukit Kecil Kota yang mengakui karena hukum sudah mengesahkan kemenangan presiden Joko Widodo:

⁶³ Masyarakat inisial DW, domisili kecamatan Alang-alang lebar. Wawancara tgl 11 November 2019.

“Kalau masalah mengakui atau tidak, ya saya mau tidak mau harus mengakui, karena hukum saja sudah mengesahkan Jokowi sebagai pemenang pilpres 2019. Tetapi awalnya saya menginginkan Prabowo yang menjadi presiden. Saya tidak memilih Jokowi menjadi presiden karena menurut saya dia sebagai presiden tidak ada ketegasan dalam memimipin negara, karena Jokowi dari kalangan sipil bukan dari kalangan militer. Dari hasil yang sudah diumumkan dan sudah ditetapkan Jokowi sebagai pemenang pada pilres 2019, jadi saya mau tidak mau harus mengakui Jokowi sebagai presiden karena hukum sudah mengesahkan dia sebagai presiden terpilih saat ini”⁶⁷

Berdasarkan dari beberapa penjelasan masyarakat diatas bahwa mereka mau tidak mau harus menyetujui atau menerima apapun keputusan hukum, berdasarkan dari penejelasan mereka pada awalnya mendukung Prabowo dan menginginkan Prabowo sebagai presiden, tetapi nyatanya KPU mengumumkan Jokowi sebagai pemenang pilpres 2019. Sebagai masyarakat memang sudah sepantasnya kita mentaati aturan hukum yang sudah di sah kan.

Lalu adapun ekpresi persetujuan masyarakat yang berinisial SLM yang berdomisili di kecamatan Kertapati Kota Palembang :

“Saya sangat menyetujui dan mendukung Jokowi menjadi presiden kembali, karena dari dulu saya senang kepada PDIP, jadi saya pilih Jokowi yang berasal dari PDIP, tetapi secara pribadi saya menyenangi juga sosok prabowo yang mempunyai kegagahan sebagai calon pemimpin”⁶⁸

⁶⁴ Masyarakat inisial MF, domisili kecamatan Bukit Kecil. Wawancara tgl 07 Agustus 2019.

⁶⁵ Masyarakat inisial SLM, domisili kecamatan Kertapati. Wawancara tgl 09 Agustus 2019.

Berdasarkan penjelasan diatas dari masyarakat yang berinisial SLM yang berdomisili di Kecamatan Kertapati Kota Palembang tersebut, menurutnya bahwa ia memilih Jokowi karena identik kepada salah satu partai yang disenanginya sejak dahulu. Dari pernyataan itu bahwa masih ada masyarakat yang memilih pemimpin dengan tradisi lama nya yang memilih pemimpin identik dengan sesuatu atau sekelompok yang sudah disenangi sejak lama. Tetapi ia juga tidak bisa menyembunyikan kesenangannya terhadap sosok Prabowo sebagai lawan Jokowi yang memiliki kegagahan sebagai calon pemimpin.

Lalu pengakuan lain dari masyarakat yang berinisial SD berdomisili di kecamatan Gandus Kota Palembang :

“Saya menyetujui Jokowi sebagai presiden, karena dia presiden terpilih saat ini, saya juga cukup puas terhadap bapak Jokowi sebagai presiden karena kinerjanya sebagai pemimpin yang cukup baik”⁶⁹

Berdasarkan pernyataan diatas sudah hal yang biasa terhadap pendapat masyarakat yang menyetujui seorang pemimpin dalam menduduki jabatan sebagai kepala negara yang dinilai dari kinerjanya dalam memimpin suatu negara. Pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo masyarakat tidak sedikit juga yang merasakan kesenangan dan kemudahan dalam bidang infrastruktur yang telah dibangun.

⁶⁶ Masyarakat inisial SD, domisili kecamatan Gandus. Wawancara tgl 10 Agustus 2019.

Pada kepemimpinan presiden Joko Widodo pembangunan semakin berkembang dan maju di seluruh Indonesia, khususnya Kota Palembang sendiri yang sudah banyak bukti yang dilakukan presiden Joko Widodo seperti persetujuan dari masyarakat yang berinisial SD tersebut yang merasa senang terhadap kinerja presiden Joko Widodo dalam membangun Negara. Seperti halnya ekspresi persetujuan dari masyarakat yang berinisial MTP yang berdomisili di kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang :

“Saya pribadi mengakui Jokowi menjadi presiden karena dari kinerjanya yang bagus, saya tidak pandai berpolitik ataupun mengkritik, tetapi saya sangat merasakan di kepemimpinan Jokowi saat ini, saya memandang dari infrastrukturnya Jokowi sangat sukses dalam membangun negara, karena selama Jokowi belum menjadi presiden tidak ada gubran yang seperti saat ini dilakukan Jokowi”⁶⁷

Berdasarkan pernyataan masyarakat dalam era kepemimpinan presiden Joko Widodo sukses dalam bidang pembangunan, masyarakat merasa puas dengan kinerja presiden Joko Widodo. Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa ada masyarakat yang mengakui Jokowi karena kewibawaan presiden Joko Widodo sebagai seorang pemimpin.

Pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo dibidang pembangunan sangatlah maju begitu pesat, dengan pembangunan yang begitu maju membuat masyarakat semakin diberikan kemudahan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, khusus lagi masyarakat Kota Palembang yang beberapa merasa sangat puas dengan kinerja presiden Joko Widodo dibidang infrastruktur. Dengan karakter yang begitu lemah lembut yang

⁶⁷ Masyarakat inisial MTP, domisili kecamatan Ilir Timur I. Wawancara tgl 09 November 2019.

dimiliki presiden Joko Widodo membuat salah satu masyarakat berinisial ER yang berdomisili di kecamatan Ilir Timur III menyukai sosok presiden Jokowi karena sifatnya yang lemah lembut :

“Saya mengakui Jokowi sebagai presiden, karena bagi saya bagus cara Jokowi memimpin negara, dia tidak memandang Suku, Agama, semua dia perlakukan sama, tidak pernah membedah - bedakan, cuma karena karakternya yang lemah lembut itu mungkin memang sudah menjadi sifat dia”⁷¹

Berdasarkan ekspresi persetujuan ER tersebut bahwa seorang pemimpin bisa diakui atau di percayai itu dari kepribadian individu seorang pemimpin. Yang harus dilakukan seorang pemimpin ialah bagaimana caranya bisa membuat daya tarik kepada masyarakat, agar masyarakat menganggap seorang pemimpin tersebut sebagai seorang pahlawan.

Menjadi seorang pemimpin memang harus banyak melakukan apa yang diinginkan masyarakat agar menarik simpati masyarakat terhadap seorang pemimpin tersebut, kepribadian seorang pemimpin itu sangat menjadi acuan terhadap masyarakat, apabila kepribadian seorang pemimpin tidak begitu baik, maka dampaknya akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya.

Seperti halnya presiden Joko Widodo yang sudah banyak menarik perhatian masyarakat secara luas, dari kepribadiannya yang sangat lemah lembut kepada masyarakat, dalam pengalamannya sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, sudah banyak yang presiden Joko Widodo

⁶⁸ Masyarakat inisial ER, domisili kecamatan Ilir Timur III. Wawancara tgl 16 Agustus 2019.

lakukan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap dirinya dengan cara merakyat seperti pada saat ada bencana alam dia turun langsung menemui masyarakat yang terkena bencana.

Pada saat presiden Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada saat Kota Jakarta dilanda banjir bapak Jokowi turun langsung kelokasi banjir dan berpartisipasi membantu pegawai dinas kebersihan membersihkan selokan, agar tidak terjadi banjir. Hal itulah beberapa strategi presiden Joko Widodo dalam menarik perhatian masyarakat untuk menyukai dirinya.

Pada sisi lain presiden Joko Widodo juga member bantuan ke masyarakat yang kurang mampu seperti bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), berobat gratis, bantuan beras raskin, dengan bantuan itu masyarakat merasakan bantuan, seperti ekspresi persetujuan dari masyarakat yang berinisial EM yang berdomisili di kecamatan Gandus :

“Saya mengakui Jokowi menjadi presiden, karena sudah banyak yang Jokowi lakukan untuk membantu rakyat kecil seperti kami, saya ucapkan Alhamdulillah sekali semenjak Jokowi menjadi presiden kami merasa sangat terbantu, setiap tahun kami mendapatkan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dari bapak Jokowi, kami tidak bisa berkata apa-apa lagi, cuma tuhan yang mengetahui”⁷²

Masyarakat menilai presiden Joko Widodo juga tegas dalam memberantas semua kasus, seperti memberantas pungli, memberantas narkoba yang merajalela, setelah kepemimpinan presiden Joko Widodo banyak gembong narkoba yang dihukum mati. Tetapi seperti yang kita

⁶⁹ Masyarakat inisial EM, domisili kecamatan Gandus. Wawancara tgl 08 Agustus 2019.

ketahui bahwa di Kota Palembang sendiri mayoritas pendukung Prabowo, maka dalam kemenangan presiden Jokowi tersebut beberapa masyarakat Kota Palembang masih tidak menerima keputusan yang sudah ditetapkan hukum.

Pada masa pemilihan presiden tentu masyarakat menginginkan suatu perubahan untuk kemajuan suatu negara. Banyak faktor yang membuat masyarakat menginginkan kepemimpinan yang baru dan tidak mengakui lagi kepemimpinan yang lama. Salah satu faktor yang membuat masyarakat menginginkan suatu perubahan seperti dari bidang perekonomian masyarakat menginginkan perubahan perekonomian dalam kehidupan mereka, seperti bahan pokok dan biaya kehidupan sehari-hari masyarakat ingin dipermudah, dan masyarakat juga menginginkan harga hasil perkebunan dinaikan.

Di masa kepemimpinan presiden Joko Widodo banyak masyarakat yang mengeluh terhadap hasil perkebunan yang dipatok harga murah karena pemerintah sering impor. Seperti ekspresi dari masyarakat berinisial WL yang berdomisili di kecamatan Kemuning Kota Palembang yang tidak menerima terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019, karena menurutnya :

“Dari hati nurani saya tidak menerima Jokowi menjadi presiden lagi, dikarenakan semenjak Jokowi menjadi presiden petani karet menjadi susah karena menurunnya harga karet dari kisaran Rp17.000 sampai turun menjadi Rp3.500 dan pada saat

*Jokowi diumumkan menang sebagai presiden pada pilpres 2019
BPJS akan dinaikan lagi biaya iurannya”⁷³*

Dari penjelasan WL tersebut bahwa dimasa kepemimpinan presiden Joko Widodo masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan perkebunan semakin tidak diuntungkan, pasalnya bahwa dimasa kepemimpinan presiden Jokowi harga karet semakin tahun semakin merosot turun harga jualnya, menurut keterangannya sebelum presiden Jokowi menjadi pemimpin harga karet itu kisaran 17.000 dan terus naik, tetapi pada saat Joko Widodo yang menjadi presiden harga karet menjadi sangat murah sampai kisaran harga 3.500 saja.

Sedangkan menurut ekspresi tidak menrima dari masyarakat yang berinisial DI yang berdomisili di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang :

“Dari hati nurani saya tidak ada pemikiran saya untuk memilih Jokowi menjadi presiden, saya tidak mengakui Jokowi presiden saat ini karena dalam kepemimpinannya tidak baik, lapangan pekerjaan semakin sulit dicari, pengangguran semakin banyak, itu salah satu sebab membuat masyarakat berbuat kriminal agar mendapatkan uang. Dan saya sebagai supir angkutan umum semakin susah mendapatkan uang karena banyaknya persaingan tranfortasi yang dilahirkan oleh pemerintah”⁷⁴

Berdasarkan pernyataan masyarakat tersebut bahwa lapangan kerja yang semakin sempit membuat masyarakat berlomba-lomba dalam mendapatkan pekerjaan. Sebagai pemerintah sudah seharusnya pimpinan negara menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak untuk warga negara Indonesia. Kriminal dan pengedaran narkoba semakin merajalela karena

⁷⁰ Masyarakat inisial WL, domisili kecamatan Kemuning. Wawancara tgl 08 Agustus 2019.

⁷¹ Masyarakat inisial DI, domisili kecamatan Ilir Barat II. Wawancara tgl 09 Agustus 2019.

salah satu faktor ialah banyaknya pengangguran. Sulitnya mencari pekerjaan membuat masyarakat kehabisan akal pikiran agar mendapatkan uang dengan cara apapun untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Dengan perekonomian yang semakin tinggi maka masyarakat mau tidak mau harus mendapatkan uang agar dapat bertahan hidup.

Adapun ekspresi tidak menyetujui dari masyarakat yang berinisial SY yang berdomisili di kecamatan Alang-Alang Lebar, bahwa dia tidak menerima presiden Joko Widodo terpilih kembali menjadi presiden, karena yang dirasakannya di era kepemimpinan presiden Joko Widodo perekonomian semakin memburuk.

“Kalau dari pribadi saya tidak menerima Jokowi terpilih kembali menjadi presiden, karena dalam kepemimpinannya perekonomian semakin memburuk. Saya sebagai pedagang sangat merasakan. Harga bahan pokok semua naik, BPJS pun akan naik lagi, kita sebagai masyarakat semakin dibuat susah, seperti orang tua saya yang didesa yang bertani karet, harga karet sekarang semakin merosot”⁷⁵

Pada dasarnya masyarakat merasa kecewa terhadap perekonomian yang semakin hari menyulitkan masyarakat menengah kebawah, kebutuhan sehari-hari berupa bahan pokok pada saat kepemimpinan presiden Joko Widodo dinaikkan dan juga BBM dinaikkan, hal inilah yang membuat masyarakat mengeluh menginginkan pemimpin yang baru agar adanya perubahan suatu perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti pendapat dari masyarakat yang berinisial BI yang berdomisili di kecamatan Sako Kota Palembang :

⁷² Masyarakat inisial SY, domisili kecamatan Alang-alang lebar. Wawancara tgl 12 Agustus 2019.

“Menurut pribadi saya tidak menerima atau tidak mengakui Jokowi terpilih kembali sebagai presiden. Pada periode pertama saya pendukung Jokowi karena kepemimpinannya yang bagus dalam memimpin provinsi DKI Jakarta. Tetapi pada saat ini saya menginginkan perubahan ganti presiden, alasannya karena dari faktor ekonomi yang buruk dimasa kepemimpinan Jokowi, bahan-bahan pokok semua naik, ya yang baru-baru ini BPJS dan BBM akan dinaikkan lagi”⁷⁶

Berdasarkan aturan asas pemilu di Indonesia bahwa pelaksanaan pemilu harus dilakukan secara jujur, adil dan demokratis. Pemilu dapat mencapai derajat tersebut maka diperlukan beberapa syarat dan prakondisi yang mendukungnya. Syarat-syarat tersebut dipergunakan untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas sehingga mendapatkan pejabat publik yang legitimate.

Pada pemilu 2019 khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden yang mempertemukan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan lawannya yaitu pasangan Prabowo subianto dan Sandiaga Salahudin Uno, banyak masyarakat yang berpikir bahwa pelaksanaan pilpres tidak berjalan dengan adil. Karena menurut beberapa pendapat masyarakat Kota Palembang paslon Joko Widodo dan Ma'ruf Amin diduga melakukan kecurangan pada pilpres 2019. Seperti Pengungkapan dari masyarakat yang berinisial RD yang berdomisili di kecamatan Ilir Timur II yang tidak mengakui presiden Joko Widodo sebagai presiden saat ini, menurutnya :

⁷³ Masyarakat inisial BI, domisili kecamatan Sako. Wawancara tgl 14 Agustus 2019.

“Saya tidak mengakui Jokowi menjadi presiden saat ini, karena dalam kemenangan Jokowi itu dalam pilpres 2019 diduga adanya kecurangan, buktinya di daerah sekayu yang surat suara sudah dicoblos terlebih dahulu kepada pasangan calon capres dan cawapres No urut 1”⁷⁴

Pada pilpres tahun 2019 beredar banyak berita yang menayangkan mengenai surat suara yang sudah tercoblos pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin, dengan beredarnya berita tersebut tentu membuat masyarakat yang kontra terhadap pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin semakin menduga bahwa paslon No urut 1 tersebut berbuat kecurangan. Tetapi kita sebagai masyarakat yang cerdas tidak semudah itu saja percaya terhadap berita yang beredar, bisa saja berita tersebut hanyalah Hoax, nyatanya KPU meresmikan kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 dan diperkuat dengan keputusan MK yang mengesahkan kemenangan tersebut.

Tetapi masyarakat masih tidak menerima dengan keputusan KPU dan MK tersebut, seperti pernyataan dari masyarakat yang berinisial ADT yang berdomisili di kecamatan Kertapati, menurutnya bahwa :

“Saya pribadi menginginkan Prabowo yang menjadi presiden, karena menurut saya semangat Prabowo yang begitu tinggi untuk merubah wajah Indonesia terhadap negara-negara asing, karena sekarang ini menurut saya Indonesia terlalu dianggap sebelah mata oleh negara asing. Tetapi nyatanya Jokowi yang menjadi presiden, saya pribadi tidak menerima Jokowi yang menang, karena menurut saya sudah cukup puas dengan kinerja Jokowi selama ini dengan menebar janji saja”⁷⁵

⁷⁴ Masyarakat inisial RD, domisili kecamatan Ilir Timur II. Wawancara tgl 14 Agustus 2019.

⁷⁵ Masyarakat inisial ADT, domisili kecamatan Kertapati. Wawancara tgl 09 November 2019.

Berbagai alasan yang sudah dilontarkan masyarakat Kota Palembang mengenai pengakuan masyarakat terhadap presiden Joko Widodo, mulai dari kinerja presiden Jokowi sampai cara kepemimpinan presiden Jokowi yang menjadi alasan masyarakat Kota Palembang memilih dan mengakui presiden Joko Widodo menjadi presiden saat ini.

Persetujuan masyarakat terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 memang banyak alasan yang masyarakat lontarkan, seperti pernyataan - pernyataan diatas bahwa masyarakat mengakui kemenangan presiden Joko Widodo dikarenakan hukum yang sudah mengesahkan dan sebagian masyarakat memang yang cukup puas dengan kinerja presiden Joko Widodo, di Kota Palembang sendiri dengan Mayoritas dengan pendukung Prabowo dan nyatanya di Kota Palembang sendiri dimenangkan oleh suara Prabowo.

Tetapi dengan hukum yang telah mengesahkan kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 maka sebagian masyarakat yang dahulunya pro terhadap Prabowo tetapi sekarang bisa menunjukkan ekspresi persetujuannya terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 karena aturan hukum telah mengesahkannya.

Seperti yang dikemukakan Beetham bahwa ekspresi persetujuan yang dapat dibuktikan pada pihak yang diperintah terhadap hubungan kekuasaan tertentu di mana mereka terlibat, melalui tindakan yang memberikan bukti persetujuan. Dan jika ekspresi persetujuan publik memberi kontribusi pada legitimasi yang berkuasa, maka penarikan atau

penolakan atas persetujuan akan dengan cara yang sama mengurangi darinya.⁷⁹ Artinya bahwa jika pihak yang diperintah mengungkapkan ekspresi persetujuannya, maka dapat dikatakan bahwa suatu kepemimpinan tersebut dinyatakan legitimate.

Berdasarkan teori legitimasi yang dikemukakan David Beetham dalam bukunya *The Legitimation Of Power*⁸⁰, bahwa menurutnya terdapat 3 bagian untuk melahirkan suatu legitimasi, yaitu *Pertama*, Kekuasaan harus dijalankan berdasarkan dengan aturan yang sudah dibuat. *Kedua*, aturan harus dibenarkan dari keyakinan bersama antara pemerintah dan yang diperintah. *Ketiga*, Pihak yang diperintah harus menunjukkan ekspresi persetujuan terhadap yang berkuasa. Artinya untuk melahirkan suatu legitimasi dari masyarakat pemerintah harus memelihara 3 bagian tersebut agar suatu pemerintahan dapat dikatakan legitimate karena adanya pengakuan dari pihak yang diperintah.

⁷⁶ Beetham, *Op.Cit.* h.19

⁷⁷ *Ibid*, h.20

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 tentu banyak pendapat tanggapan masyarakat khususnya masyarakat Kota Palembang. Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa dari 27 informan yang diambil dari 18 Kecamatan Kota Palembang. 10 informan yang menyatakan menerima kemenangan presiden Joko Widodo.

Karena dalam kepemimpinan presiden Jokowi dalam bidang infrastruktur semakin maju seperti pembangunan LRT di Kota Palembang dan pembangunan jalan Tol yang mempermudah masyarakat dalam melakukan perjalanan dan dalam kepemimpinan presiden Jokowi masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan-bantuan yang diluncurkan pemerintah seperti sembako gratis, bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan masyarakat juga menilai kepemimpinan presiden Jokowi sangat tegas dalam menangani kasus narkoba dan korupsi atau pungli.

Sedangkan 17 informan menyatakan tidak menerima kemenangan presiden Joko Widodo. Sebagian besar masyarakat menilai dari kinerja presiden Joko Widodo yang masih kurang baik, masyarakat menilai bahwa presiden Joko Widodo hanya fokus dengan infrastruktur saja tanpa mementingkan aspek-aspek lainnya yang dibutuhkan masyarakat dan sebagian masyarakat juga menduga kemenangan presiden Joko Widodo karena adanya kecurangan.

Sebagian masyarakat juga menilai pada masa kepemimpinan presiden Jokowi semakin buruk perekonomian di Indonesia yang membuat masyarakat semakin kesulitan dalam membiayai kehidupan sehari-hari karena sembako semuanya dinaikkan, lalu BBM dinaikkan tanpa sepengetahuan masyarakat dan BPJS akan dinaikkan biaya tarifnya. Masyarakat menginginkan perubahan agar terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti sudah lakukan, dari 27 informan yang diambil dari 18 kecamatan Kota Palembang menurut peneliti sudah mewakili legitimasi masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019, dengan 10 informan yang menyatakan bahwa menerima kemenangan presiden Joko Widodo. Sedangkan 17 informan tidak menerima kemenangan presiden Joko Widodo. Maka dari hasil penelitian yang peneliti sudah dapatkan bahwa kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 dapat dinyatakan tidak *legitimate* karena dari hasil yang didapatkan bahwa lebih banyak pendapat masyarakat yang kontra terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019.

B. Saran

Sebagai masyarakat memang sudah menjadi kewajiban dalam menilai atau mengkritik seorang pemimpin agar terciptanya pemimpin yang berkualitas. Namun, kita sebagai masyarakat juga harus mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum. Karena hukum simbol suatu kekuatan negara, apabila masyarakat tidak lagi mematuhi hukum maka negara akan terancam kedaulatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Anter, Andreas, (2014). *Max Weber's Theory Of The Modern State*, Berlin: Palgrave Macmilan.
- Beetham, David, (1988). *The Legitimation Of Power*, Tottenham : Palgrave Houndmills
- BPS (2018). *Kota Palembang Dalam Angka*, CV. Alief Media Grafika.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. (2008). *Metedologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT.Bumi Askara.
- Heywood, Andrey, 2013, *Politics* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)

B. Sumber Karya Ilmiah

- Adytyas, Nico Oktario, Isnening Yulianti dan I Gusti Agung Ayu Kade Galuh. (2018), Legitimasi Partai Politik Gerindra (Modal dan Struktur Peluang Gerindra Merebut Legitimasi Parlemen), *Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, Vol.18 No.1
- Apriani, R., & Maharani, M. (2019). Strategi Pemenangan Pasangan Calon Herman Deru Dan Mawardi Yahya Pada Pilkada Sumatera Selatan Tahun 2018. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 17-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4065>
- Chandra, A., Darmawan, E., & Yesi, Y. (2018). Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 2(1), 12-30. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v2i1.4061>
- Darmawan, E., & Septiana, A. (2019). Analisis Fungsi Partai Politik Pada Pilkada Musi Banyuasin 2017 (Studi Terhadap Partai Politik Pengusung Pasangan Dodi Reza Dan Beni Hernedi). *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 28-41. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4066>

Danamik, Ahmad Taufan, (2012) Relasi Kekuasaan, Kepentingan Dan Legitimasi Dalam Analisa Politik, *Jurnal Politeia*, Vol.4 No.1

Ekawati, Ely Nor, (2012) Legitimasi Politik Pemerintahan Desa (Studi Pengunduran Diri Kepala Desa Di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar), *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, Vol.1 No.2.

Haryanto, Handrix Chris, Tia Rahmania, Ahmad R.Mubarak, Agung B.dopo, Hafil Fauzi, dan Erdizal Fajri. (2015) Bagaimana Persepsi Keterpercayaan Masyarakat Terhadap Elit Politik ?*Jurnal Psikologi*, Vol.42 No.3. 2015.

Huda, Khoirul, Pemilu 2019 : *Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa*, Jurnal UNNES, Vol.4 No.3. 2018.

Nugroho, Heru, (2012). Demokrasi dan Demokratisasi : Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemeikiran Sosiologi*, volume.I nomor.1.

Qibtiyah, M. (2019). Tingkah Laku Ekonomi-Politik dalam Hegemoni Agama dan Budaya. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 55-68.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4068>

Sarbaini . (2015) Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Inovatif*, Vol.7 No.1. hlm.106-117.

Septiliana, Ninis Ristiani (2011) “*Hubungan Antara Pemahaman Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Dengan Sikap Demokrasi Pada Siswa Kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karanganyar*” Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- Taufikkurahman. (2018), Legitimasi Pemberhentian Keanggotaan DPR / DPRD Oleh Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif Dengan Sistem Proporsional Terbuka. *Jurnal Nuansa*, Vol.15, No1.hlm.92-124.
- Yahya, A. (2019). Political Communication of Hasan Basri Agus; Dramaturgical Analysis in Jambi Local Government Implementation. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(2), 156-165.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4401>

C. Sumber Internet

<https://m.liputan6.com/pages/profil-calon-pilpres-2019?slug=jokowi-maruf-amin>, diakses tanggal 25 September 2019, pukul 20.00 Wib.

Rika,Hesti (2019), *KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Pemenang Pilpres 2019* diakses dari<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2019052102082532396686/kpu-tetapkan-jokowi-maruf-pemenang-pilpres-2019.tgl> 01 Juli 2019

www.palembang.go.id, di akses tgl 27 agustus 2019, pukul 02.00 wib.

www.pilpres2019.kpu.go.id diakses tanggal 03 September 2019, pukul 12.00 Wib.

www.viva.co.id. diakses tgl 14 November 2019, pukul 01.00 wib.

D. Sumber Wawancara

AD *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 15 meneit.

AG *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 10 meneit.

AN *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 13 meneit.

AG*Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 15 meneit.

ADT *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 15 meneit.

BI *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 8 meneit.

BN *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 11 meneit.

BY *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 13 meneit.

DJ *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 18 meneit.

DI *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 20 meneit.

DW *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 10 meneit.

EM *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 12 meneit.

ER *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 15 meneit.

HT *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 4 meneit.

ID *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 9 meneit.

JH *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 7 meneit.

MF *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 14 meneit.

MTP *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 18 meneit.

NH *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 10 meneit.

RD *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 5 meneit.

RH *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 12 meneit.

SD *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 11 meneit.

SLM *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 10 meneit.

SY *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 15 meneit.

WL *Inisial. 2019. Wawancara terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Palembang. 30 meneit.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bapak / Ibu tinggal dimana ?
2. Bapak / Ibu berprofesi sebagai apa ?
3. Pada pemilu 2019 yang dilakukan serentak seluruh Indonesia, apakah bapak/ibu berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu tersebut ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

4. Bapak / Ibu mendukung siapa pada pilpres 2019 ?

Nomor
Lampiran
Perihal

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 ?
: B.1168/Un.09/VIII/AL.01/09/2019
: Monon izin Pra Penelitian

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo, apakah kepemimpinannya berjalan berdasarkan aturan yang ditetapkan ?
Kepada Yth,
Masyarakat Kota Palembang
di
Tempat

7. Menurut pendapat bapak/ibu kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 tersebut terdapat kecurangan atau memang dari suara masyarakat ?
Assalamu ualaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

8. Dalam kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019, apakah

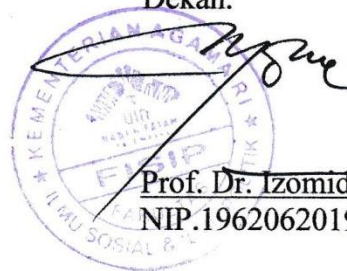
Nama : Bobby Sumarlin
NIM : 1657020022
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang.

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Pra Penelitian tersebut.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan.



Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001

Tembusan :

1. Ka.Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : B.970 /Un.09/VIII/PP.01/08/2019

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik **a.n: Bobby Sumarlin, 16 Agustus 2019**

- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016;
 6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Dr. Andi Candra jaya, M.Hum	197201192007011001	Pembimbing I
Hatta Azzuhri, S.IP, M.Si	2016028804	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : Bobby Sumarlin

N I M : 1657020022

Prodi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Legitimasi Politik Masyarakat Kota Palembang terhadap Kemenangan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 16 Agustus 2019 s/d 16 Agustus 2020

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan:

1. Rektor ;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2)
4. Ketua Prodi Ilmu Politik
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Palembang, 16 Agustus 2019

Dekan

Prof. Dr. Izomiddin, MA

NIP. 196206201988031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING I

Nama Mahasiswa : BOBY SUMARLIN
NIM : 1657020022
Program Studi : ILMU POLITIK
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Judul Skripsi : TANGGAPAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG TERHADAP
KEMENANGAN PRESIDEN JOKO WIDODO PADA PILPRES 2019
DALAM PERSPEKTIF LEGITIMASI POLITIK.
Pembimbing I : Dr. Andi Candra Jaya, M. Hum.
Pembimbing II : Hatta Azzuhrri, S.I.P. M.Si.

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1	Selasa / 08-10-2019	Pabnk: hum Bal 2	P
2	Rabu / 09-10-2019	Pabnk: Bal 2	P
3	Kamis / 10-10-2019	Pabnk: hum Bal 1A	P
4	Jumat / 11-10-2019	abnk: ya d hnt	P
5	Senin / 14-10-2019	Pelgri: asal unles leleng ka d pachele	P
6	Rabu / 16-10-2019	ACE vpon suthn.	P



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING II

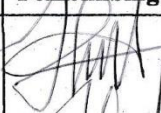
Nama Mahasiswa : BOBY SUMARLIN
NIM : 1657020022
Program Studi : ILMU POLITIK
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Judul Skripsi : TANGGAPAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG TERHADAP
KEMENANGAN PRESIDEN YOKO WIDODO PADA PILPRES 2019
DALAM PERSPEKTIF LEGITIMASI POLITIK
Pembimbing I : Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum
Pembimbing II : Hatta Azzuhri, S.IP, M.Si

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1	Jum'at / 09-08-2019	Perbaikan Penulisan BAB I	
2	Rabu / 14-08-2019	Bagan kerangka Teori BAB I	
3	Selasa / 27-08-2019	ACC BAB I	
4	Kamis / 29-08-2019	Penulisan BAB II	
5	Senin / 02-09-2019	Penulisan BAB II	
6	Kamis / 05-09-2019	ACC BAB II	
7	Selasa / 10-09-2019	Tata-tata cara Penelitian	
8	Rabu / 11-09-2019	Hasil Penelitian	
9	Jumat / 27-09-2019	Penulisan Bab III	
10	Senin / 30-09-2019	Menambahkan Bahasa Asli Teori	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
11	Selasa/ 01-10-2019	ACC BAB III	
12	Rabu/ 02-10-2019	ACC BAB IV	
13	Jumat/ 04-10-2019	ACC ABSTRAK	
14	Senin/ 07-10-2019	ACC KESELURUHAN	

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Rabu tanggal 06 bulan November tahun 2019 Skripsi Mahasiswa :

Nama : Boby Sumartin

Nomor Induk Mahasiswa : 1057020022

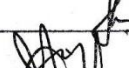
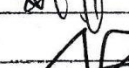
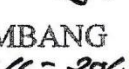
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Pengaruh Masyarakat Kota Palembang Terhadap Kehidupan di Siden Joko Widodo pada Pilkada 2019 dalam Perspektif Legitimasi Politik

MEMUTUSKAN

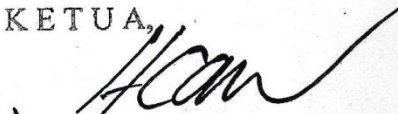
- Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada hari ini Rabu maka saudara dinyatakan : **LULUS/ ~~BERHASIL~~**,
Indeks Prestasi Kumulatif :, oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (SI) **Sarjana Sosial (S.Sos)**.
- Perbaikan dengan Team Penguji selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu/ sebelum penutupan pendaftaran Wisuda terhitung sejak ditetapkan.
- Apabila melanggar point 2 diatas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti Wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Team Penguji :

NO.	TEAM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	<u>Dr. Andi Corina Jaya, M.Hum</u>	Ketua Penguji	
2	<u>Erik Darmawan, M.Hi</u>	Sekretaris Penguji	
3	<u>Dr. Eon Budianto, M.Si</u>	Penguji Utama	
4	<u>Mariatu Ribtiyah, M.A.Si</u>	Penguji Kedua	
5	<u>Dr. Andi Corina Jaya, M.Hum</u>	Pembimbing I	
6	<u>Ratna Azzahri, M.Si</u>	Pembimbing II	

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 06-11-2019

KETUA,


Dr. Andi Corina Jaya, M.Hum
NIP.

SEKRETARIS,


Erik Darmawan, M.Hi
NIP. 105702019057402

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Ketua Sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : *Bahy Sumartini*
NIM : *1657020022*
Jurusan : *Studi Ilmu Politik*
Judul Skripsi : *Tanggapan Masyarakat Kota Palembang terhadap
Keterbongkaran Presiden Joko Widodo dalam
2019 dalam Persatif Kogratmasi Politik*

Telah dimunaqasahkan pada hari.....*Rabu*..... tanggal.....*06*..... bulan.....*November*..... tahun.....*2019*.....

dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS Dengan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :.....

Palembang,

Ketua,

Ham
Dr. Anis Cahya Jaya, M. Hum
NIP.

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN
SKRIPSI**

Nama : BOBY SUMARLIN
NIM : 1657020022
Program Studi : ILMU POLITIK
Tanggal Ujian Munaqasah : 06 - 11 - 2019
Judul Skripsi : Legitimasi Politik masyarakat Kota Palembang
terhadap Kemenangan Presiden Joko Widodo
pada Pilpres 2019

TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA SAAT UJIAN MUNAQSAH DAN TELAH
DISETUIJI OLEH DOSEN PENGUJI I DAN DOSEN PENGUJI II.

NO.	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. KUN BUDIANTO, M.Si	Penguji I	
2	MARIATUL QIBTIYAH, MA, SI	Penguji II	

Palembang, 15 NOVEMBER 2019

Menyetujui,


DR. ANDI CANDRA JAYA, M.HUM
Dosen Pembimbing I


HATTA AZZUHRI, M.SI
Dosen Pembimbing II